A. BIDANG PENDIDIKAN (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif. b. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif. c. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang pendidikan. d. Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan PLS e. Pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS f. Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang pendidikan. g. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar sekolah. 2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten. 4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. 6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. 8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 11. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten. 12. Pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan.
2. Pembiayaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
3. Kurikulum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 5. Penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar TK, kurikulum muatan lokal, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS dan program kegiatan PLS, kepemudaan dan keolahragaan. 6. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
4. Sarana dan Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 4. Penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya. 5. Penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS. 6. Pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta modul program PLSD. 7. Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah dan masyarakat. 8. Pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan PLB antara lain penyediaan tanah, pembangunan/ rehabilitasi gedung dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan PLS. <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan informasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta tenaga teknis PLS. b. Perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan) tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta tenaga teknis PLS. c. Perencanaan penempatan tenaga kerja kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta tenaga teknis PLS. 3. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya 4. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten. 5. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS, <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta tenaga teknis PLS. b. Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta tenaga teknis PLS. c. Pelaksanaan pemberhentian/pensiunan tenaga kerja kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta tenaga teknis PLS. d. Pelaksanaan alih tugas tenaga kerja kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta tenaga teknis PLS. 6. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 7. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 8. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karir kemampuan profesional dan kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS. b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>c. Pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kerja kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS.</p> <p>9. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan</p>
<p>6. Pengendalian Mutu Pendidikan</p>	<p>1. Penilaian Hasil belajar</p>	<p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten.</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten.</p> <p>4. Pelaksanaan program kegiatan belajar TK dan kurikulum SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional</p> <p>5. Pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah.</p> <p>6. Pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta program PLS.</p> <p>7. Pelaksanaan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS.</p> <p>8. Perencanaan dan penghargaan biaya pendidikan persekolahan dan luar sekolah.</p> <p>9. Pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik</p>
	<p>2. Evaluasi</p>	<p>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS</p>
	<p>3. Akreditasi</p>	<p>Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan formal dan non formal.</p>
	<p>4. Penjaminan Mutu</p>	<p>1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</p> <p>4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.</p> <p>5. Pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, bahasa dan sastra.</p>
<p>7. Kesiswaan</p>		<p>1. Pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa.</p> <p>2. Pemberian izin mutasi siswa</p>

B. BIDANG KESEHATAN (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten. 5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkungan kabupaten 6. Perencanaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial 7. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup kabupaten 8. Penyelenggaraan kewaspadaan pangan dan gizi lingkup kabupaten 9. Pengembangan kerjasama lintas sektor lingkup kabupaten dna kerjasama antar daerah
	2. Lingkungan Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan lingkungan 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkungan kabupaten 4. Penyelenggaraan akuntabilitas instansi kesehatan di wilayah kabupaten 5. Penyelenggaraan akuntabilitas instansi kesehatan di wilayah kabupaten
	3. Perbaikan gizi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten. 3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat
	4. Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gaji skala kabupaten. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. 6. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. 2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan 3. Implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan atau sistem lain di kabupaten
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten. 3. Pelatihan teknis skala kabupaten 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten 2. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan. 3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. 4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. 5. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.(Perbekalan kesehatan rumah tangga) 6. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). 7. Pemberian izin apotik, toko obat. 8. Sertifikasi keamanan industri rumah tangga. 9. penapisan dan pengembangan iptek kesehatan/kedokteran canggih Mengamankan kebijakan pengawasan dan pengendalian 10. Pelaksanaan kegiatan pengawasan program kesehatan 11. Pencatatan dan pelaporan obat pelayanan kesehatan dasar
5. Pemberdayaan Masyarakat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten 2. Penyelenggaraan upaya/sarana kesehatan kabupaten 3. Penyelenggaraan upaya dan promosi kesehatan masyarakat 4. Menyelenggarakan program pelatihan kesehatan di wilayah kabupaten
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan. 2. Perencanaan pembangunan kesehatan wilayah kabupaten 3. Pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan kabupaten 4. Perizinan kerja/praktek kerja tenaga kesehatan 5. Perizinan sarana kesehatan 6. Perizinan distribusi pelayanan obat skala kabupaten (apotik dan toko obat) 7. Pendayagunaan tenaga kesehatan 8. Penetapan tarif pelayanan kesehatan lingkup kabupaten 9. Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional 10. Bimbingan dan pengendalian upaya/sarana kesehatan skala kabupaten 11. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan lingkup kabupaten
	2. Penelitian dan Pengembangan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten 2. Pengelolaan surkesda skala kabupaten. 3. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten 4. Penelitian dan pengembangan kesehatan kabupaten
	3. Kerjasama luar negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten
	4. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten
	5. Pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan SIK skala kabupaten 2. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan kabupaten

C. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
<p>1. Pengendalian Dampak Lingkungan</p>	<p>1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten. 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten. 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan 8. Menetapkan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya 9. Menetapkan prosedur operasi standar penanggulangan tumpahan dan bahan kimia lainnya dalam rangka melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak 10. Pemantauan tingkat radiasi/magnet
	<p>2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten. 5. Penyusunan rencana pengendalian sumber daya dengan mengakomodasi aspek budaya di tiap kabupaten 6. Penyusunan rencana kerja pelestarian fungsi sosial lingkungan hidup 7. Pemberian rekomendasi teknis penetapan lokasi TPS dan TPA
	<p>3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten. 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. 10. Melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran air dengan menyusun peta sensitif 11. Pengawasan pengendalian kerusakan tata air daerah kabupaten
	<p>4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	Pencemaran Udara	<ol style="list-style-type: none"> 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan 6. Pengukuran mutu udara ambien 7. Pemantauan emisi sumber tidak bergerak 8. Pemantauan emisi di sekitar industri 9. Pemantauan tingkat kebisingan lingkungan 10. Pemantauan tingkat kebauan lingkungan
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten 5. Pengelolaan terhadap ekosistem strategis 6. Pengkajian kearifan lingkungan dalam konservasi sumber daya alam pada berbagai kelompok masyarakat 7. Pengaturan akses terhadap sumber daya gentika 8. Pembinaan terhadap masyarakat lokal/adat sebagai pemilik sumber daya genetika 9. Membentuk lembaga yang menangani permasalahan akses sumber daya genetika di daerah 10. Pengawasan pengendalian kerusakan hutan daerah kabupaten 11. Konservasi taman nasional 12. Menetapkan spesies langka yang dilindungi 13. Pengawasan, pemantauan dan operasi terhadap perdagangan spesies langka/dilindungi 14. Penetapan penentuan aspek sosial budaya dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan 15. Penyusunan rencana kerja pengakomodasian aspek sosial budaya dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam kabupaten 16. Melindungi dan melestarikan suaka alam
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten. 5. Pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah 6. Pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah daerah kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		7. Penetapan baku mutu lingkungan kabupaten berdasarkan peraturan nasional
	7. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten
	8. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten. 2. Penetapan baku mutu lingkungan hidup daerah
	9. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 4. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten 5. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 6. Menetapkan otorita komponen daerah di bidang rekayasa genetika 7. Penyusunan petunjuk pelaksanaan penguksesan Program Adipura 8. Koordinasi pelaksanaan penguksesan Program Adipura 9. Pengembangan peraturan daerah yang terkait dengan disinsentif ekonomi bagi pelaku usaha di daerah 10. Pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup kabupaten 11. Pengembangan kebijakan analisis biaya manfaat (cost benefit analysis) 12. Pengembangan kebijakan efektif biaya (cost effectiveness) dalam mengalokasikan sumber daya dan lingkungan 13. Kebijakan pemuatan nilai-nilai dan pengetahuan kearifan lingkungan dalam informasi lingkungan hidup nasional 14. Penetapan jasa yang bergerak di bidang jasa lingkungan kabupaten 15. Penetapan daerah wisata dan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan
	10. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten 2. Menetapkan daftar industri/perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi sistem manajemen lingkungan (ISO-14001) dan ekolabel 3. Pendataan perusahaan yang telah menerapkan system produksi bersih 4. Pengusulan daftar perusahaan dalam kegiatan Proper 5. Pemantauan dan pembinaan perusahaan peserta Proper
	11. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	12. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten
	13. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten.
	14. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten
	15. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten.
	16. Laboratorium Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah 2. Pembinaan terhadap lembaga laboratorium - laboratorium lingkungan daerah baik pemerintah maupun swasta 3. Pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga laboratorium - laboratorium lingkungan daerah baik pemerintah maupun swasta
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kabupaten 7. Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan plasma muftah 8. Pengaturan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan plasma muftah 9. Menetapkan dan melestarikan keanekaragaman hayati daerah 10. Mengembangkan sistem pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah 11. Pendataan dan pengusulan calon peserta Kalpataru 12. Pembinaan dan pemantauan peserta Kalpataru 13. Konservasi exc – situ dan in-situ

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
<p>1. Sumber Daya Air</p>	<p>1. Pengaturan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air kabupaten. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air kabupaten 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air kabupaten. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten 6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten 7. Penetapan peraturan daerah Kabupaten di bidang tata perairan pengairan (dalam kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan/pengelolaan air dan sumber air serta pengendalian daya rusak air) 8. Penetapan dan pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat kabupaten di bidang tata perairan 9. Penyusunan rencana makro kabupaten (penentu prioritas dan pengaturan) di bidang tata perairan 10. Penyusunan program dan anggaran daerah Kabupaten di bidang tata perairan 11. Penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang pengairan
	<p>2. Pembinaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air kabupaten. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air kabupaten. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten. 5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten. 6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten 7. Penerapan dan pengawasan pedoman dan manual di bidang pengairan 8. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang pengairan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten 9. Pengawasan standarisasi nasional di bidang sarana dan prasarana pengairan 10. Penetapan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi daerah kabupaten dalam kegiatan pengairan 11. Alokasi SDM dan pemberdayaan SDM meliputi aparatur, masyarakat dan mitra kerja 12. Pelaksanaan Diklat dan pendidikan non formal daerah di bidang sumber daya air 13. Pengembangan jaringan telematika untuk sistem informasi dan data hidrologi air dan sumber air daerah Kabupaten 14. Penelitian dan pengembangan teknis di bidang pengairan 15. Perizinan mendirikan, mengubah, membongkar (selain yang tersebut di atas) yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi yang seluruh jaringan irigasi berada dalam satu kabupaten 16. Penetapan persyaratan pemberian izin yang terkait dengan air dan sumber air yang terletak dalam satu wilayah kabupaten 17. Pemberian izin untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam satu wilayah kabupaten 18. Pembinaan BUMD/koorporitasi wilayah sungai kabupaten 19. Penerapan standar pelayanan minimal bidang sumber daya air yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten 20. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang pengairan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada propinsi 21. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang pengairan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		22. Pelaksanaan rencana induk pengembangan sumber daya air Kabupaten 23. Koordinasi/pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai lintas kabupaten dan atau strategis regional
	3. Pembangunan Pengelolaan /	1. Konservasi sumber daya air kabupaten. 2. Pendayagunaan sumber daya air kabupaten. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sumber daya air kabupaten 8. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pengairan yang jangkauan pelayanannya terletak dalam satu kabupaten yang sesuai kemampuan kabupaten 9. Penanggulangan bencana berskala kabupaten di bidang pengairan 10. O & P sumber daya air dan jaringan irigasi dalam wilayah kabupaten 11. Penyelenggaraan tugas pembantuan pembangunan sumber daya air lintas propinsi 12. Pengelolaan air bawah tanah <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan atau mata air Menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, perusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan atau mata air Memberian izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), izin penurapan (SIP), dan izin pengambilan mata air (SIPMA) Menetapkan dan mengatur system jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan atau mata air dalam wilayahnya Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah
	4. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air kabupaten. 2. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jaringan irigasi 3. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap sumber daya air dalam kabupaten 4. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang tata perairan
2. Bina Marga	1. Pengaturan	Pengaturan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa <ol style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota 3. Penetapan status jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. 4. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa 5. Penetapan peraturan daerah tingkat Kabupaten di bidang jalan 6. Penetapan kebijakan kabupaten di bidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro 7. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat kabupaten di bidang jalan 8. Penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek jalan strategis kabupaten dan jalan desa 9. Pengaturan dan penetapan status jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten, jalan kota serta jalan desa 10. Penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang jalan kabupaten
	2. Pembinaan	<p>Pembinaan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparaturnya penyelenggara jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa 2. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 3. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. 4. Penerapan dan pengawasan NSPM di bidang jalan 5. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana jalan dan wajib dilaksanakan oleh kabupaten 6. Perizinan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan kabupaten 7. Pemberian izin pemanfaatan Damaja dan Dawasja untuk jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten 8. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada provinsi 9. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang jalan 10. Penetapan sistem informasi jalan kabupaten 11. Penelitian dan pengembangan teknik teknologi di bidang jalan 12. Penetapan persyaratan pemberian izin pembangunan jalan tol di dalam kabupaten (non lintas kabupaten) 13. Pemberian izin pembangunan jalan tol di dalam kabupaten (non lintas kabupaten)
	3. Pembangunan dan pengusaha	<p>Pembangunan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa 2. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. 3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. 4. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa 5. Perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten, jalan kota dan jalan desa 6. Penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan kabupaten 7. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan 8. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan tol non lintas kabupaten 9. Perencanaan, pembangunan dan atau pemeliharaan jalan nasional yang ditugaspembantuan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	4. Pengawasan	Pengawasan jalan kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa 2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa 3. Pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa 4. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang jalan
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK. 3. Penyusunan peraturan daerah kabupaten dan sebagai pelaksana peraturan propinsi dan nasional dalam prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan 4. Penetapan kebijakan tingkat kabupaten dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan 5. Penetapan kebijakan kelembagaan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan 6. Penyusunan rencana, program dan anggaran tingkat kabupaten bersama masyarakat di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan 7. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan 8. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual areal pemakaman 9. Pengumpulan dan analisa data jumlah jiwa yang meninggal
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten 3. Penerapan dan pengawasab NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan 4. Penerapan dan pengawasan pedoman pelestarian dan revitalisasi kawasan bersejarah dan kawasan budidaya 5. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten 6. Pengusulan pelimpahan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada propinsi 7. Sosialisasi SPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan 8. Pengembangan sistem informasi tingkat kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan 9. Koordinasi pengelolaan areal pemakaman 10. Koordinasi penataan areal pemakaman
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten. 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten. 5. Penanggulangan bencana berskala kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan 6. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> 7. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang ditugaspembantuan 8. Pembangunan sarana dan sarana pemakaman 9. Pemeliharaan sarana dan sarana pemakaman
	4. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 3. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perdesaan 4. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan dalam kabupaten 5. Pengawasan terhadap penerapan peraturan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan 6. Pengawasan terhadap peraturan dan ketentuan pelaksanaan (NSPK) pemakaman
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.
	2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten. b. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
	3. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten. 2. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 5. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten. 6. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten 7. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten
	4. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSP
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah domestik di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah domestik di wilayah kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah domestik di wilayah kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah domestik kabupaten. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah domestik.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah domestik untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah domestik kabupaten. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten).
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah domestik kabupaten. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten. 5. Penyusunan rencana dan penentuan/penetapan lokasi TPA dan TPS
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK bidang pengelolaan persampahan
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten.
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten.
	c. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
	2. Permukiman Kumuh: a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh di wilayah kabupaten. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten.
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten. 2. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh dengan rusunawa.
	c. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
	3. Pembangunan kawasan: a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional
	c. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten. 4. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 5. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten. 6. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, dan prosedur. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung permanen, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan 2. Penetapan peraturan daerah di bidang jasa konstruksi berdasarkan pengaturan tingkat nasional 3. Penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi kabupaten 4. Penetapan kebijakan kelembagaan kabupaten di bidang jasa konstruksi 5. Penyusunan rencana, program dan anggaran daerah kabupaten di bidang pengembangan jasa konstruksi
	2. Pemberdayaan	1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi 7. Pemberian izin usaha konstruksi nasional 8. Pengembangan SDM di bidang jasa konstruksi 9. Pengembangan usaha termasuk mendorong kemitraan 10. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang jasa konstruksi 11. Pengembangan sistem informasi nasional di bidang jasa konstruksi 12. Fasilitasi penyelenggaraan forum jasa konstruksi tingkat kabupaten 13. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi
	3. Pengawasan	1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 3. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi tingkat kabupaten

E. BIDANG PENATAAN RUANG (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
------------	----------------	--------------------------------------

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat kabupaten bidang penataan ruang b. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten 2. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 3. Penetapan NSPM bidang penataan ruang wilayah kabupaten 4. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten 5. Penetapan kawasan strategis kabupaten 6. Penyusunan peraturan daerah kabupaten dan berbagai pelaksanaan peraturan propinsi dan nasional dalam penyelenggaraan penataan ruang 7. Penetapan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang 8. Penetapan kebijakan kelembagaan tingkat kabupaten di bidang penataan ruang 9. Penyusunan rencana, program dan anggaran di tingkat kabupaten bersama masyarakat di bidang penataan ruang 10. Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 11. Penyusunan dan analisa data/informasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi NSPKM, SPM dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 2. Pendidikan dan pelatihan ketataruangan 3. Penelitian dan pengembangan ketataruangan 4. Sosialisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5. Pengembangan sistem informasi, komunikasi dan telematika penataan ruang kabupaten. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. 8. Penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada DAS 9. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang penataan ruang yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada propinsi 10. Pengembangan jaringan telematika sistem informasi dan tata penataan ruang kabupaten
3. Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. 4. Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang. 5. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten. 6. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 7. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. 8. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 9. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 10. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten. 11. Penyusunan program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		12. Penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 13. Pengembangan Taman Rekreasi 14. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. 15. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. 16. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 17. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten. 18. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten. 19. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 20. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. 21. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten. 22. Penyelenggaraan penataan ruang dan pengusaha investasi di dalam kawasan kabupaten bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha
4. Pengawasan		1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten 2. Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW kabupaten 3. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang penataan ruang 4. Penetapan perubahan fungsi kawasan di dalam kabupaten dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem 5. Pengawasan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau

F. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten. 2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. 3. Penetapan pedoman dan standar mekanisme perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 4. Penyusunan dan pelaksanaan SPM kabupaten bidang perencanaan pembangunan 5. Penyusunan dan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri. 6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 8. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 9. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten. 10. Penyusunan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten. 12. Penyusunan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten. 13. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten. 14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten. 15. Penyusunan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten. 16. Pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan skala kabupaten. 17. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten. 2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten. 3. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten. 4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten. 5. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 6. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa. 7. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten. 8. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa. 9. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten. 10. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa. 11. Pengembangan wilayah tertinggal skala kabupaten. 12. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten. 13. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa. 14. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten. 15. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten. 2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa. 3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal skala kabupaten. 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten. 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten. 9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.

G. BIDANG PERUMAHAN (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan kepemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. 2. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 3. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten. 4. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten 5. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 6. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 7. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 8. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten. 9. Melaksanakan hasil sosialisasi 10. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 11. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 12. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten 13. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal. 14. Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten. 15. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> 16. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diparkoran, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi 17. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan. 18. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum. 19. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
	2. Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten. 3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kabupaten. 4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 5. Penetapan harga sewa rumah. 6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten.
	3. Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. 3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. 7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan baru	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan perumahan dan permukiman tingkat kabupaten berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional b. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan bangunan gedung tingkat kabupaten berdasarkan pedoman

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>penyelenggaraan tingkat nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat kabupaten d. Penerapan dan pengawasan pedoman konservasi dan revitalisasi arsitektur bangunan, dan lingkup lingkungan permukiman bersejarah dan atau nasional e. Penerapan dan pengawasan pedoman sistem dan mekanisme untuk mobilisasi dana jangka panjang serta subsidi perumahan (KPR, Rusunawa, Sewa Beli P2BPK) f. Penerapan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh propinsi di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung g. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada propinsi h. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang perumahan dan permukiman bangunan gedung, rumah dan gedung negara. i. Penyiapan pendamping di bidang perumahan dan permukiman pada masyarakat di kabupaten. j. Pengembangan dan pelayanan informasi dan komunikasi kabupaten perumahan dan permukiman serta bangunan gedung. k. Penelitian dan pengembangan teknik teknologi bangunan bidang perumahan dan permukiman serta bangunan termasuk konservasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.</p>
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 4. Penyusunan RP4D di wilayahnya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
	2. Kawasan Skala Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya
	3. Kawasan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
	5. Keserasian Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten. 14. Penyusunan peraturan daerah kabupaten dan berbagai pelaksana peraturan propinsi dan nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta bangunan gedung bersama masyarakat 15. Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat kabupaten bidang pengembangan perumahan dan permukiman (pembinaan/ pendampingan dan pengaturan langsung pada masyarakat) 16. Penetapan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat kabupaten di bidang penataan ruang 17. Penyusunan rencana, program dan anggaran di tingkat kabupaten bersama masyarakat di bidang perumahan dan permukiman 18. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang perumahan dan permukiman kabupaten 19. Penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman 20. Penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset kabupaten 21. Pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada kawasan yang berada pada wilayah kabupaten bukan ditentukan sebagai kawasan tertentu 22. Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman serta bangunan umum yang diamanatkan oleh ketentuan undang-undang atau Peraturan Daerah 23. Pembangunan perumahan dan permukiman yang ditugas pembantuan
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>pertanahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten. 14. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung negara ditingkat kabupaten 15. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
<p>7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran serta Masyarakat dan Sosial Budaya</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.</p>
	<p>2. Pemugaran</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.</p>
	<p>3. Perbaikan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.</p>
	<p>4. Perluasan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

H. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif. <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan dan penetapan program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan 3. Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan
	2. Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten : <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten. e. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional. 2. Pengadaan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan 3. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan formasi tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan b. Perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan) tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan c. Perencanaan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan 4. Pemberian penghargaan dan perlindungan kepemudaan dan keolahragaan 5. Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan keolahragaan 6. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan
	3. Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten : <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten.
	4. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan. 2. Pelaksanaan mutasi tenaga teknis kepemudaan <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengangkatan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga teknis kepemudaan c. Pelaksanaan pemberhentian/pensiunan tenaga teknis kepemudaan d. Pelaksanaan alih tugas tenaga teknis kepemudaan 3. Pelaksanaan, pengelolaan kegiatan kepemudaan 4. Pelaksanaan penilaian hasil kegiatan kepemudaan 5. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pemuda 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan 7. Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di masyarakat dan kegiatan kepemudaan 8. Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang pemuda
2. Olahraga	1. Kebijakan Bidang Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. d. Pengelolaan keolahragaan. e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
	2. Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten : <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten. c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	3. Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten : <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten : <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana. 2. Pelaksanaan mutasi tenaga teknis keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengangkatan dan penempatan tenaga teknis keolahragaan b. Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga teknis keolahragaan c. Pelaksanaan pemberhentian/pensiunan tenaga teknis keolahragaan d. Pelaksanaan alih tugas tenaga teknis keolahragaan 3. Pelaksanaan, pengelolaan kegiatan keolahragaan 4. Pelaksanaan penilaian hasil kegiatan keolahragaan 5. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang olahraga 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga keolahragaan 7. Pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat/tradisional 8. Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang olahraga
3. Sarana dan Prasarana		Penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan.

I. BIDANG PENANAMAN MODAL (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
<p>1. Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Kebijakan Penanaman Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi 2. Perumusan dan Penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi 3. Koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten. d. Penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar. e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten. 4. Penetapan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. 5. Identifikasi jenis sumber daya daerah kabupaten dalam rangka perencanaan bentuk peraturan daerah kabupaten tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta kemitraan 6. Identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan 7. Penyusunan program pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana strategis daerah (RENSTRADA) sesuai dengan program pembangunan daerah (PROPEDA) kabupaten 8. Penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah kabupaten dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan/prioritas 9. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan/prioritas 10. Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas 11. Penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan 12. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten 13. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah 14. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi
<p>2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Kerjasama Penanaman Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	2. Promosi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. 3. Koordinasi, pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi promosi skala kabupaten 4. Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun luar negeri seperti seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya 5. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak antara lain daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal dan dalam bentuk media elektronik antara lain film, video, slide, CD Room dan multimedia/situs web 6. Kerjasama dengan propinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam bentuk penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah 7. Pelaksanaan forum kerjasama dengan usaha besar dalam rangka kemitraan 8. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri 9. Pengiriman misi penanaman modal daerah ke daerah lain dan luar negeri 10. Penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain dan luar negeri 11. Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat 12. Penyiapan materi dalam rangka kerjasama sub regional di bidang penanaman modal, seperti kerjasama Indonesia – Malaysia – Singapore Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Brunai Darussalam - Indonesia – Malaysia – Philippines East Asean Growth Area (BIMP – EAGA), dan Australia – Indonesia Development Area (AIDA) 13. Pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri di bidang penanaman modal kepada aparat dan dunia usaha 14. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi
	3. Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten. 5. Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha/proyek selain yang menjadi kewenangan propinsi dan pusat 6. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek sebagaimana dimaksud dalam huruf a 7. Pemberian perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi :

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) b. Izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing (IKTA) berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang kemigrasian c. Izin usaha tetap/izin usaha perluasan d. Izin lokasi e. Sertifikat hak-hak atas tanah f. Izin mendirikan bangunan (IMB) g. Izin undang-undang gangguan (HO) 8. Pemberian perizinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, angka 2) khusus bagi tenaga kerja warga negara asing yang bekerja hanya 1 (satu) kabupaten, angka 4), angka 5), angka 6) dan angka 7) berlaku juga untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh propinsi dan pemerintah pusat (BKPM) 9. Pemberian insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya 10. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan perizinan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi. 3. Pemantauan pengembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya 4. Pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di wilayahnya 5. Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya 6. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atau ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh kabupaten 7. Penyelesaian permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di wilayahnya 8. Penyusunan laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi penanaman modal di daerahnya secara berkala 9. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi. 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah. 5. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang berintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal propinsi dan pemerintah pusat (BKPM) 6. Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek PMDN dan PMA 7. Pemutakhiran data dan informasi promosi penanaman modal daerah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparat pemerintah dan dunia usaha. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.

J. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Kelembagaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten (Tugas Pembantuan) 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten. 4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten. 5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten. 6. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten. 7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten (Tugas Pembantuan). 8. Pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitas pembiayaan, koperasi dan UKM melalui antara lain bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya 9. Pelaksanaan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat yang memungkinkan koperasi dan UKM maupun bersaing 10. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan atau badan luar negeri dalam pengembangan koperasi dan UKM 11. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi yang berskala kabupaten 12. Penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan UKM
2. Pemberdayaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: 2. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah; 3. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; 4. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; 5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; 6. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya; 7. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> 8. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten. 9. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten. 10. Penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi 11. Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi 12. Pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten di bidang koperasi 13. Pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan atas nama negara di bidang koperasi 14. Pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia 15. Pelaksanaan program pengembangan jaringan sistem informasi koperasi 16. Pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi koperasi 17. Pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan koperasi 18. Pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada koperasi antara lain pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah
<p>3. Pemberdayaan UKM</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d. Teknologi. 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain. 4. Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan UKM 5. Penyusunan rencana operasional program pengembangan usaha kecil menengah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten di bidang UKM 7. Pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan atas nama negara di bidang UKM 8. Pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan UKM di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia 9. Pelaksanaan program pengembangan jaringan sistem informasi UKM 10. Pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi UKM 11. Pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan UKM 12. Pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada UKM antara lain pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi	Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kabupaten. 2. Pembinaan pengawasan bimbingan penyelenggaraan koperasi dan UKM 3. Pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi 4. Pengendalian atas pelaksanaan sistem distribusi bagi koperasi dan UKM

K. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten 2. Penetapan kebijakan dinamika kependudukan yang mendukung pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan kependudukan nasional 3. Penataan persebaran penduduk di lingkungan kabupaten 4. Penataan urbanisasi dan migrasi non permanen di lingkungan kabupaten 5. Penetapan tingkat fertilitas dan kesehatan reproduksi penduduk kabupaten 6. Penetapan tingkat morbiditas dan moralitas penduduk kabupaten 7. Penetapan rencana kependudukan daerah yang mengacu pada arah kependudukan nasional 8. Penetapan proyeksi penduduk (jumlah, mutu, struktur dan komposisi) 9. Penetapan biaya pelayanan Akte Catatan Sipil
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten
	3. Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk. <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan dan pelayanan informasi persebaran penduduk dan potensi SDSDM berdasarkan kompetensi <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data dan identifikasi persebaran dan potensi penduduk dan potensi sumber daya b. Pengumpulan data dan identifikasi mobilitas penduduk c. Analisis data persebaran dan potensi penduduk berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan d. Pembuatan informasi persebaran dan potensi penduduk e. Pelayanan informasi persebaran dan potensi penduduk f. Pembentukan dan pengembangan jaringan informasi 4. Pelaksanaan penataan persebaran penduduk <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kelompok (segmentasi) penduduk sasaran mobilitas penduduk b. Penetapan areal tujuan mobilitas penduduk c. Kerjasama antar kabupaten dalam mobilitas penduduk d. Komunikasi, informasi dan edukasi (sosialisasi, advokasi, motivasi) tentang mobilitas penduduk (potensi SDA dan SDM) e. Pelayanan/fasilitas tentang mobilitas penduduk f. Pelayanan penempatan penduduk g. Pelayanan peningkatan sosial ekonomi 5. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan penduduk 6. Penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan 7. Penyelenggaraan analisis dampak kependudukan 8. Penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan (pendaftaran/pencatatan penduduk yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan, adopsi, pengakuan anak, naturalisasi dan pencatatan perubahan status penduduk, termasuk biodata penduduk) 9. Penerbitan kartu keluarga (KK) dan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 10. Penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT) 11. Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK) 12. Penerbitan Kartu Penduduk Sementara 13. Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman 14. Pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk 15. Penyerasian perencanaan pembangunan lintas sektor di daerah berdasarkan perencanaan kependudukan daerah 16. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk
	4. Pemantauan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mobilitas penduduk

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten, antara lain Penetapan Kutipan Akta Kelahiran Gratis dari usia 0-60 hari kerja atau mempunyai Kartu Keluarga Miskin
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten antara lain koordinasi dengan tingkat kecamatan dalam hal teknis pencatatan sipil; dan dengan SKPD lain dalam rangka pemutakhiran data kependudukan. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan perkawinan Non Muslim; c. Pencatatan perceraian Non Muslim; d. Pencatatan kematian; e. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; f. Pencatatan perubahan nama; g. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; h. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; i. Penerbitan dokumen akta-akta hasil pencatatan sipil; j. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil. 3. Penerbitan Akte Catatan Sipil
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil dalam bentuk pendidikan dan pelatihan skala kabupaten antara lain Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan komputerisasi Akta.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten. 6. Pembangunan bank data kependudukan kabupaten. 7. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. 8. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 9. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 10. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten/ kota. 11. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil 12. Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan 13. Penyelenggaraan jaringan informasi kependudukan 14. Penyelenggaraan sistem informasi kependudukan
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten 2. Pemantauan perkembangan kependudukan daerah berdasarkan rencana indikator kependudukan baku strategis
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten/ kota
	2. Penyelenggaraan	1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten. 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten
	4. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	2. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 3. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten. 4. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. 5. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 6. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten
	4. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.

L. BIDANG KETENAGAKERJAAN (URUSAN WAJIB) DAN KETRANSMIGRASIAN (URUSAN PILIHAN)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten. 6. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data lowongan kerja lokal, antar daerah dan antar negara b. Pengumpulan data pencari kerja lokal, antara daerah dan antar negara c. Pembuatan naskah informasi pasar kerja untuk disebarakan melalui media masa, leaflet, bocklet dan papan pengumuman d. Pelaksanaan penyebaran informasi pasar kerja untuk disebarakan melalui media masa, leaflet, booklet dan papan pengumuman 7. Penyusunan perencanaan tenaga kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis data perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan persektor b. Penyusunan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan c. Penyusunan perencanaan tenaga kerja d. Penyebarluasan dan sosialisasi perencanaan tenaga kerja dan sektor terkait
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten. 6. Rekrutmen Diklat dan Penempatan Tenaga Pengawas Tenagakerjaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencalonan pegawai pengawas ketenagakerjaan b. Pendidikan khusus dan pembinaan keahlian serta penempatan pegawai pengawas ketenagakerjaan 7. Pola ketatalaksanaan pengawas ketenagakerjaan: pembuatan laporan, administrasi dan dokumentasi 8. Pola operasional pengawas ketenagakerjaan : pelaksanaan kegiatan pengawas ketenagakerjaan 9. Pelaksanaan pengawasan norma pelatihan <ol style="list-style-type: none"> a. Penyebarluasan norma pelatihan b. Pemeriksaan pelaksanaan norma pelatihan c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma pelatihan 10. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan dalam dan luar negeri <ol style="list-style-type: none"> a. Penyebarluasan norma penempatan dalam dan luar negeri b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penempatan dalam dan luar negeri c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma penempatan dalam dan luar negeri 11. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan TKWNAP <ol style="list-style-type: none"> a. Penyebarluasan norma penempatan TKWNAP b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penempatan TKWNAP c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma penempatan TKWNAP
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten. 3. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten. 4. Penyelenggaraan pelatihan kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis kebutuhan pelatihan b. Penyusunan rencana dan program pelatihan c. Sosialisasi program pelatihan d. Pendaftaran peserta pelatihan e. Seleksi peserta pelatihan f. Pelaksanaan pelatihan g. Penyiapan penyelenggaraan uji keterampilan melalui koordinasi propinsi 5. Penyelenggaraan pembinaan lembaga pelatihan kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan dan bimbingan kepada : penyelenggaraan/manager pelatihan dan tenaga kerja teknis pelatihan b. Pelaksanaan pelatihan pada penyelenggaraan pelatihan dan tenaga teknis c. Pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi manfaat program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan kepada dunia industri atau pengguna b. Pembuatan perjanjian bersama c. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak pengguna d. Pemantauan dan evaluasi 7. Pelaksanaan pemagangan dalam negeri <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi program pemagang ke perusahaan-perusahaan b. Penjajakan peluang kerjasama dengan perusahaan dalam negeri melalui kunjungan ke perusahaan c. Pembuatan kerjasama dengan perusahaan d. Penempatan lulusan program pemagangan e. Pemantauan dan evaluasi 8. Pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan dan pembinaan mengenai peraturan dan manfaat memiliki izin pelatihan, tata cara dan prosedur pemberian izin, baik melalui booklet atau leaflet ataupun brosur b. Penerimaan dan registrasi permohonan izin c. Pengujian kelayakan berkas/dokumen d. Pengujian kelayakan lapangan e. Pemberian rekomendasi f. Pengeluaran izin g. Pemantauan dan evaluasi 9. Pembinaan layanan informasi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan pencetakan bahan-bahan informasi antara lain berupa buku, majalah, booklet, leaflet atau konsultasi langsung b. Pemantauan dan evaluasi 10. Peningkatan produktifitas kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis potensi sumber daya daerah b. Pengukuran dan analisis produktifitas c. Penyuluhan dan sosialisasi produktifitas d. Pelatihan produktifitas e. Konsultasi produktifitas f. Proyek percontohan g. Pemantauan dan evaluasi
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. 2. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten. 3. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten. 4. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. 5. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten. 6. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten. 8. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kabupaten. 9. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten. 10. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL). 11. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten. 12. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten. 13. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten. 14. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM. 15. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten. 16. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 17. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten. 18. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten. 19. Penyelenggaraan bursa kerja : <ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran pencari kerja b. Pencarian lowongan kerja c. Mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja d. Pembinaan terhadap bursa kerja swasta, petugas, manajemen bursa kerja, teknis bursa kerja 20. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan dan penyuluhan jabatan kepada <ul style="list-style-type: none"> - Pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara - Siswa sekolah - Masyarakat b. Pelaksanaan test leader/tes psikologi c. Pelaksanaan analisis jabatan d. Pembinaan penerapan analisis jabatan instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan swasta dan lembaga lainnya 21. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> a. Antar Kerja Lokal (AKAL) <ul style="list-style-type: none"> - Pencari lowongan kerja - Pendaftaran pencari kerja - Seleksi - Pembinaan penempatan kepada pencari kerja - Penelitian dan pengesahan perjanjian kerja - Penempatan tenaga kerja

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Antar Kerja antar Daerah (AKAD) <ul style="list-style-type: none"> - Mencari lowongan kerja melalui kerja sama dengan daerah penerima tenaga kerja (MOU AKAD) - Analisis permintaan AKAD - Analisis perjanjian kontrak kerja - Perjanjian kontrak pencari kerja - Pelatihan pencari kerja - Pembinaan pencari kerja - Persiapan penempatan tenaga kerja - Penempatan tenaga kerja (mengantar ke lokasi) - Penjemputan setelah selesai kontrak kerja
	<p>5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten. 2. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten. 3. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten. 4. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten. 5. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI. 6. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten. 7. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten. 8. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 9. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten. 10. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten. 11. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten. 12. Antar Kerja Negara (AKAN) <ol style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan penempatan kerja di luar negeri b. Pendaftaran calon tenaga kerja ke luar negeri c. Seleksi calon tenaga kerja ke luar negeri d. Penerbitan Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) e. Pemantauan kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri termasuk pencegahan TKI ilegal 13. Pemberian izin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan dan pengawasan lembaga bursa kerja <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan - Peninjauan lokasi lembaga bursa kerja - Pemberian izin - Pemantauan pelaksanaan bursa kerja b. Perizinan dan pengawasan praktek psikologi <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan - Peninjauan lokasi tempat praktek psikologi - Pemberian izin

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan pelaksanaan praktek psikologi c. Perizinan dan pengawasan tempat penampungan TKI <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian kelengkapan persyaratan penampungan TKI - Peninjauan lokasi penampungan - Pemberian izin - Pemantauan pelaksanaan penampungan d. Perizinan dan pengawasan Perwarda <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian kelengkapan persyaratan perwarda - Peninjauan kantor dan rencana kegiatan - Pemberian izin - Pemantauan pelaksanaan praktek perwarda 14. Perizinan dan pengawasan perpanjangan izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) <ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan b. Analisis jabatan yang akan diduduki oleh TKA c. Pengecekan kesesuaian jabatan dengan positif list TKA yang dikeluarkan oleh Depnaker d. Pemberian perpanjangan izin TKA e. Pemantauan pelaksanaan kerja TKA f. Pemberian rekomendasi TKA
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten. 2. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten. 3. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten 4. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten. 5. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi. 6. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten. 7. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten. 8. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten. 9. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten/ kota. 10. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten. 11. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur. 12. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten. 13. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten. 14. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten. 15. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>16. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi.</p> <p>17. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi.</p> <p>18. Pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bijaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha b. Pembuatan risalah perundingan c. Pembinaan pembuatan kesepakatan (apabila terdapat penyelesaian) <p>19. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat pemerataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan pengaduan b. Pemanggilan para pihak c. Pemerantaraan penyelesaian perselisihan industri pemberian anjuran d. Pemberian anjuran e. Pembuatan risalah penyelesaian perselisihan industrial f. Pembinaan pembuatan kesepakatan penyelesaian perselisihan industrial <p>20. Pembinaan hubungan industrial</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidkan hubungan industrial <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan pada perusahaan - Pelaksanaan pendidikan hubungan industrial tingkat dasar kepada pekerja organisasi pekerja b. Pemberdayaan organisasi pekerja <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi peraturan tenaga organisasi pekerja - Pendaftaran organisasi pengusaha - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota organisasi pengusaha c. Pemberdayaan lembaga kerjasama Bipartit <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi peraturan tentang LKS Bipartit - Pembinaan pembentukan LKS Bipartit - Pendaftaran organisasi LKS Bipartit - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS Bipartit d. Pemberdayaan lembaga kerjasama Tripartit <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi peraturan tentang LKS Tripartit - Pembinaan pembentukan LKS Tripartit - Pendaftaran organisasi LKS Tripartit - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS Tripartit <p>21. Pemberdayaan hubungan industrial:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan pelaksana gerakan perbaikan hubungan industrial b. Pembentukan forum komunikasi pemberdayaan hubungan industrial c. Penyuluhan peran para pelaku produksi dalam pemberdayaan hubungan industrial <p>22. Pembinaan dan penyuluhan hubungan industrial :</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan peraturan perusahaan <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi peraturan tentang peraturan perusahaan - Pembinaan dan pembuatan peraturan perusahaan - Pengesahan peraturan perusahaan b. Pembuatan kesepakatan kerja bersama <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi peraturan tentang kesepakatan kerja sama - Pengukuhan kesepakatan kerja bersama pada pekerja dan pengusaha - Pembinaan pembuatan kesepakatan kerja bersama - Pendaftaran kesepakatan kerja bersama c. Pembuatan perjanjian kerja <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi peraturan tentang peraturan tentang perjanjian kerja - Pembinaan peraturan perjanjian kerja - Pendaftaran perjanjian kerja d. Pengupahan <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi peraturan tentang pengupahan - Pembinaan aplikasi pengupahan e. Jaminan sosial tenaga kerja <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi peraturan tentang peraturan jaminan sosial tenaga kerja - Pembinaan pelaksanaan keanggotaan, klaim Jamsostek - Pendataan kepesertaan Jamsostek dan perkembangannya 23. Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) : <ul style="list-style-type: none"> a. Upah b. Harga kebutuhan pokok c. Kemampuan perusahaan d. PDRB e. Indek harga konsumen (IHK) 24. Pelaksanaan pengawasan PDS TK, PDS Upah dan Program : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyebarluasan ketentuan tentang PDS TK, PDS Upah dan Program b. Pemeriksaan pelaksanaan PDS TK, PDS Upah dan Program c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran kepesertaan dan program JAMSOSTEK 25. Pelaksanaan pengawasan JPK dengan manfaat lebih baik : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyebarluasan ketentuan tentang JPK dengan manfaat lebih baik b. Pemeriksaan pelaksanaan JPK dengan manfaat lebih baik c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan JPK dengan manfaat lebih baik 26. Pelaksanaan pengawasan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Hari Tua : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyebarluasan ketentuan tentang Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Hari Tua b. Pemeriksaan pelaksanaan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Hari Tua

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Hari Tua
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 5. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten. 6. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten. 7. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten. 8. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten. 9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 10. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 11. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 12. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 13. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah. 14. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah. 15. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah. 16. Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan <ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan norma wajib lapor ketenagakerjaan - Pemeriksaan pelaksanaan norma wajib lapor ketenagakerjaan - Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma wajib lapor ketenagakerjaan b. Pelaksanaan pengawasan upah minimum <ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan norma upah minimum - Pemeriksaan pelaksanaan norma upah minimum - Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma upah minimum c. Pelaksanaan pengawasan upah lembur <ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan norma pembayaran upah lembur - Pemeriksaan pelaksanaan norma pembayaran upah lembur - Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma pembayaran upah lembur d. Pelaksanaan pengawasan upah <ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan ketentuan upah - Pemeriksaan pelaksanaan upah - Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan upah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> e. Pelaksanaan pengawasan norma waktu kerja dan waktu istirahat <ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan norma waktu kerja dan waktu istirahat - Pemeriksaan pelaksanaan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat - Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat f. Pelaksanaan pengawasan norma penyandang cacat <ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan norma penyandang cacat - Pemeriksaan pelaksanaan penyandang cacat - Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan penyandang cacat 17. Pelaksanaan Pengawasan Norma Perempuan dan Anak <ul style="list-style-type: none"> a. Penyebarluasan norma kerja malam wanita : <ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan norma kerja malam wanita - Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja malam wanita - Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma kerja malam wanita b. Pelaksanaan pengawasan kerja wanita : <ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan norma kerja wanita - Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja wanita - Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma kerja wanita c. Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja anak : <ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan norma tenaga kerja anak - Pemeriksaan pelaksanaan norma tenaga kerja anak - Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma tenaga kerja anak 18. Penggunaan tenaga kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan produktifitas kerja <ul style="list-style-type: none"> - Pendataan dan analisis potensi tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia <ul style="list-style-type: none"> 1) Penempatan pada perusahaan <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan pada perusahaan - Rekrutmen dan seleksi - Penempatan 2) Usaha mandiri <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan /pelatihan keterampilan tertentu sesuai dengan potensi - Pemberian modal kerja - Pembinaan pelaksanaan usaha 19. Pengembangan dan perluasan kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Perluasan kesempatan kerja <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan lembaga relawan dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela <p>Rincian kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan relawan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan - Membangun jaringan kerja antar lembaga - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan - Melaksanakan international voluter day setiap tanggal 5 desember 2) Pembentukan dan pendayagunaan TKS <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan pendayagunaan TKS - Merencanakan pembentukan dan pendayagunaan TKS - Melaksanakan penugasan dan pembinaan - Pelaporan dan evaluasi - Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan 2) Perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 3) Pembinaan 4) Pelaporan dan evaluasi 5) Membangun jaringan kerja antar lembaga/instansi dan memfasilitasi sarana dan prasarana usaha - Pengembangan, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna <p>Rincian kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan 2) Perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 3) Pembinaan 4) Pelaporan dan evaluasi 5) Membangun jaringan kerja antar lembaga/instansi dan memfasilitasi sarana dan prasarana usaha - Pengembangan sektor informasi dan usaha mandiri <p>Rincian kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis potensi sumber daya daerah dan penentuan prioritas sektor pengembangan 2) Penyuluhan program bimbingan sektor informal dan usaha mandiri 3) Seleksi peserta bimbingan sektor informal dan usaha mandiri untuk mendapatkan peserta yang potensial 4) Penyelenggaraan bimbingan/pelatihan : <ul style="list-style-type: none"> - Kewirausahaan atau motivational achievement training - Manajemen usaha 5) Pemberian modal usaha 6) Pembinaan pelaksanaan usaha 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha - Sistem padat karya <p>Rincian kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis sumber daya untuk pengembangan program padat karya 2) Sosialisasi program padat karya

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> 3) Pendaftaran dan seleksi peserta program 4) Pelaksanaan program padat karya b. Penanggulangan penganggur <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk kelembagaan penanggulangan penganggur yang mempunyai tugas : <ul style="list-style-type: none"> 1) Menyusun kebijakan operasional penanggulangan pengangguran 2) Membangun jaringan kerja 3) Usaha model penanggulangan pengangguran dan peluang usaha 4) Penggalang dana penanggulangan pengangguran 5) Menyusun mekanisme dan prosedur penyaluran dana untuk penanggulangan pengangguran 6) Mapping SDA 7) Sosialisasi - Membina kelembagaan penanggulangan pengangguran - Pelaporan dan evaluasi
2. Ketransmigrasian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten. 2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten. 3. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 4. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten. 5. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten.
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan tanah untuk pembangunan resettlement penduduk di wilayah kabupaten. 2. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan resettlement penduduk skala kabupaten. 3. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten. 4. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan resettlement penduduk skala kabupaten. 5. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. 6. KIE ketransmigrasian skala kabupaten. 7. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> 8. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. 9. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten. 10. Penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten. 11. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah. 12. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten. 13. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten. 14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten.
	4. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten. 2. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten. 3. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten. 4. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten. 5. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten. 6. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten. 7. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten. 8. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten. 9. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi. 10. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi. 11. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi. 12. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi. 13. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi. 14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten.

M. BIDANG PERTANIAN (URUSAN PILIHAN) DAN KETAHANAN PANGAN (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten. 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten. 6. Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten. 7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten. 8. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten. 9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten. 10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten. 11. Perencanaan pembangunan pertanian 12. Perencanaan operasional standar pelayanan minimal di bidang pertanian 13. Perencanaan program dan proyek pembangunan pertanian 14. Perencanaan kerjasama antar wilayah kabupaten 15. Pengendalian pelaksanaan pembangunan pertanian 16. Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian 17. Penetapan tata ruang dan guna lahan 18. Konservasi tanah dan air serta sumber daya hayati dan ekosistemnya 19. Rehabilitasi lahan krisis di kawasan pertanian 20. Penetapan sasaran areal 21. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumberdaya lahan 22. Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis
	2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa. 2. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. 3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 4. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). 5. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 6. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani. 7. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier 8. Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi 9. Pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		10. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi untuk budidaya tanaman 11. Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian 12. Pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT) 13. Pembinaan teknis konservasi air 14. Perencanaan pengembangan sumber daya air
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten. 3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. 7. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk 8. Pelaksanaan peringatan dini antisipasi terhadap kelangkaan pupuk 9. Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk di tingkat desa 10. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk di tingkat desa 11. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk 12. Bimbingan dan pembinaan pupuk 13. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk
	4. Pestisida	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten. 3. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida 7. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pestisida 8. Pelaksanaan peringatan dini antisipasi terhadap kelangkaan pestisida 9. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida di tingkat desa 10. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida di tingkat desa 11. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida 12. Bimbingan dan pembinaan penggunaan pestisida 13. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pestisida
	5. Alat dan Mesin Pertanian	1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten. 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten. 6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. 8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. 9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian. 11. Perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita 12. Rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita 13. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita 14. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian 15. Perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian produk lokal dan atau impor 16. Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian 17. Pembinaan dan bimbingan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian
	6. Benih Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten. 2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten. 3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten. 4. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten. 5. Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten. 6. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. 7. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih. 8. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. 9. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 10. Pemberian izin produksi benih. 11. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. 12. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. 13. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 14. Penetapan sentra produksi benih tanaman. 15. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 16. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten. 17. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. 18. Pembangunan dan pengelolaan balai benih milik pemerintah 19. Pembinaan balai benih milik swasta 20. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih 21. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih besar 22. Bimbingan dan pemantauan produk benih 23. Bimbingan dan penerapan standar-standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode 24. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi perbenihan 25. Pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar 26. Pemberian izin produksi benih

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		27. Pengujian dan penyebarluasan benih(bibit) varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura 28. Pengaturan penggunaan benih(bibit)unggul 29. Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan perbanyak bibit hortikultura 30. Pelaksanaan dan bimbingan serta distribusi pohon induk sertifikasi benih 31. Penetapan sentra-sentra produksi 32. Identifikasi benih(bibit) varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura
	7. Pembiayaan	1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan(kredit) agribisnis. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.
	8. Perlindungan Tanaman	1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT(fenomena iklim) wilayah kabupaten. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT(fenomena iklim) wilayah kabupaten. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT(fenomena iklim) dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT(fenomena iklim) wilayah kabupaten. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT(fenomena iklim)wilayah kabupaten. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten
	9. Perizinan Usaha	1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 3. Pemberian izin usaha agroindustri 4. Pemantauan dan pengawasan izin usaha agroindustri pertanian
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 3. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil pertanian 4. Bimbingan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian 5. Bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian 6. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil pertanian
	11. Pembinaan Usaha	1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 3. Pelaksanaan studi amdal(UKL-UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten. 6. Bimbingan penerapan pedoman(kerjasama) kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten. 6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten. 7. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 5. Pelaksanaan promosi komoditas pertanian 6. Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pertanian 7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian 8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 3. Pengumpulan data statistik spesifikasi lokasi serta sistem informasi pertanian spesifik lokasi 4. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas pertanian dan sumber daya alam 5. Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian 6. Diseminasi kepada pemakai langsung 7. Pembinaan dan pengelolaan lembaga perstatistikan dan informasi pertanian 8. Pengadaan SDM perstatistikan dan sistem informasi pertanian 9. Pengadaan sarana dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian 10. Perawatan dan evaluasi sistem dan teknologi sistem informasi
	16. Pengawasan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan secara administratif 2. Evaluasi efektifitas kegiatan yang dilaksanakan
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten. 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten. 7. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten. 8. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten. 9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten. 10. Perencanaan dan pengendalian <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana perkebunan kabupaten b. Penyusunan wilayah, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan kabupaten c. Penelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan kabupaten d. Penyusunan perencanaan program dan proyek pembangunan perkebunan kabupaten e. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun f. Penetapan kawasan pertanian terpadu kabupaten
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. 2. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. 3. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 4. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 5. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. 6. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten. 3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. 7. Pengujian jenis pupuk untuk kebutuhan komoditas dan lokasi di kabupaten 8. Penyuluhan penggunaan pupuk 9. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk di kabupaten 10. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk di kabupaten 11. Pengembangan sistem informasi perpupukan di kabupaten
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten. 3. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida. 7. Pengujian daya efektifitas pestisida 8. Penyuluhan penggunaan dan pemusnahan pestisida 9. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, peredaran dan penggunaan serta pemusnahan pestisida

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		10. Pemantauan dan evaluasi dampak penggunaan pestisida serta penanggulangan 11. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran pestisida di kabupaten
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten. 3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kabupaten. 6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. 7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. 8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. 9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. 10. Pembinaan dan pengembangan bengkel (pengrajin) alat dan mesin perkebunan. 11. Pengkajian daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian 12. Penyusunan rencana kebutuhan dan identifikasi alat dan mesin di kabupaten 13. Penyuluhan penggunaan alat dan mesin 14. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat dan mesin di kabupaten 15. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran alat dan mesin
	6. Benih Perkebunan	1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten. 2. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten. 3. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 4. Pemantauan benih impor wilayah kabupaten. 5. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten. 6. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten. 7. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. 8. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan. 9. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. 10. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 11. Pemberian izin produksi benih perkebunan. 12. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. 13. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. 14. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 15. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. 16. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. 17. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten. 18. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. 19. Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan balai benih 20. Pemberian izin usaha penangkaran benih bina perorangan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		21. Penilaian berkala terhadap izin usaha penangkaran benih bina perorangan swasta (proyek) 22. Pelaksanaan sertifikasi benih/bibit 23. Pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina 24. Pengadaan benih pokok (SS) dan benih sebar (BS) tanaman perkebunan (semusim) 25. Penerapan standar teknis perbenihan/pembibitan yang meliputi sarana, tenaga dan mode 26. Pengembangan sistem informasi perbenihan 27. Pemantauan dan evaluasi produksi benih/bibit, mutu benih/bibit dan varietas unggul
	7. Pembiayaan	1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan (kredit)perkebunan. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.
	8. Perlindungan Perkebunan	1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT (fenomena iklim) wilayah kabupaten. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT (fenomena iklim) wilayah kabupaten. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT (fenomena iklim) wilayah kabupaten. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT (fenomena iklim) wilayah kabupaten. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kabupaten. 8. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten. 9. Pemantauan, pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Pengendalian Hama Terpadu (PHT), bencana alam dan gangguan usaha perkebunan di kabupaten 10. Pemetaan pengendalian OPT, PHT, bencana alam dan gangguan usaha perkebunan di kabupaten 11. Penyuluhan pengendalian dan penanggulangan OPT, PHT, penanggulangan bencana alam dan gangguan usaha perkebunan 12. Penerapan teknologi pengendalian OPT, PHT di kabupaten 13. Pemantauan penggunaan pestisida 14. Pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati 15. Penetapan areal yang terkena eksplosi serangan OPT, bencana banjir, kekeringan, kebakaran serta analisis kerugiannya 16. Pengendalian eksplosi hama dan penyakit 17. Penyediaan dukungan sarana pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman 18. Pengembangan sistem informasi perlindungan perkebunan di kabupaten 19. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari
	9. Perizinan Usaha	1. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten. 3. Pengumpulan dana penyebaran data informasi perwilayahan komoditas termasuk kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN) di kabupaten regional dan nasional 4. Pengumpulan dan penyebaran data dan informasi supply dan demand produksi komoditas di kabupaten, regional dan nasional 5. Bimbingan dan pelaksanaan persyaratan teknis, sosial, ekonomis dan ekologi usaha agribisnis perkebunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Kerjasama dan kelembagaan usaha agribisnis perkebunan 7. Perhitungan potensi pendapatan asli daerah dari usaha perkebunan 8. Pemberian izin usaha perkebunan 9. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan di kabupaten 10. Pengembangan sistem informasi perizinan usaha perkebunan di kabupaten
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten. 2. Penyusunan rencana rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di kabupaten 3. Penyuluhan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di kabupaten 4. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di kabupaten 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di kabupaten 6. Pengembangan sistem informasi rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di kabupaten
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten. 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten. 5. Bimbingan penerapan pedoman (kerjasama) kemitraan usaha perkebunan. 6. Percobaan hasil lembaga pelatihan 7. Penyusunan dan penyebaran brosur, leaflet, buku, majalah, tabloid, media elektronik dan media komunikasi lainnya mengenai perkebunan 8. Pembuatan demonstrasi plot 9. Penyusunan rencana dan kebutuhan penyuluhan di kabupaten 10. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di kabupaten 11. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian 12. Pelaksanaan studi Andam/UKL-UPL di bidang pertanian 13. Bimbingan pelaksanaan AMDAL
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten. 3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten. 4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten. 5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten. 6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten 7. Pengkajian daya dukung unit pengolahan hasil industri primer dan lanjutan untuk komoditas perkebunan di kabupaten bekerjasama dengan lembaga penelitian 8. Penyusunan pohon industri untuk komoditas perkebunan 9. Penyuluhan potensi penggunaan unit pengolahan hasil

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		10. Pemberian izin pengoperasian unit pengolahan hasil dikaitkan dengan izin usaha perkebunan mencakup hubungan equivalensi kapasitas produksi dengan luas areal perusahaan kebun dan industrinya di kabupaten 11. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin dan pengoperasian unit pengolahan hasil industri perkebunan di kabupaten 12. Penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologi pengolahan hasil perkebunan
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten. 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten. 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten. 5. Pengumpulan data dan informasi pasar (lokal, regional dan internasional) 6. Penyebaran data dan informasi pasar komoditas perkebunan di kabupaten 7. Analisis dan evaluasi data dan informasi pasar (lokal, regional dan internasional) komoditas perkebunan 8. Analisis dan evaluasi formula harga dasar komoditas perkebunan 9. Promosi komoditas perkebunan melalui kerjasama dan kelembagaan (lokal, regional, dan internasional)
	14. Sarana Usaha	1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten 3. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data dan informasi perkebunan di kabupaten 4. Melaksanakan sistem informasi manajemen perkebunan dan sistem informasi geografis perkebunan di kabupaten
	16. Sumber daya manusia	1. Penyusunan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan baik di tingkat lapangan maupun staf di kabupaten 2. Pemberdayaan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan 3. Pengembangan karir staf 4. Pengembangan kesejahteraan tenaga kerja 5. Pengembangan sistem informasi sumber daya manusia perkebunan 6. Pelaksanaan kursus/pelatihan di kabupaten
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten. 2. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten. 3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. 4. Pengembangan lahan hijauan pakan. 5. Penetapan padang penggembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	1. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 3. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 4. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 5. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 7. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten. 8. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 9. Pembinaan dan pengembangan bengkel (pengrajin) alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten. 10. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 11. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 12. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten. 3. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten. 4. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten. 5. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 6. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten. 7. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten. 8. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten. 9. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. 10. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten. 11. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten. 12. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten. 13. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten. 14. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten. 15. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional (pabrikasi) wilayah kabupaten. 16. Bimbingan kelembagaan (Asosiasi) bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten. 17. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer 18. Pengawasan pemakaian sediaan biologis, farmasetic dan premic 19. Bimbingan sediaan biologis, farmasetic dan premic 20. Bimbingan dan pengawasan sediaan biologis, farmasetic dan premic
	5. Pakan Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten. 2. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten. 3. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten. 4. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten. 6. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten. 7. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. 8. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten. 9. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten. 10. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten. 11. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) wilayah kabupaten. 12. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten. 13. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten. 14. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten. 15. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten. 16. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten. 17. Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat 18. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian 19. Bimbingan produksi hygiene pakan ternak 20. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran 21. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak
	6. Bibit Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten. 2. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten. 3. Bimbingan registrasi(pencatatan) ternak bibit wilayah kabupaten. 4. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 5. Pengawasan peredaran bibit(benih) ternak wilayah kabupaten. 6. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten. 7. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten. 8. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten. 9. Pengadaan(produksi)dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten. 10. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten. 11. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. 12. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten. 13. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten. 14. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten. 15. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten. 16. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten. 17. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten. 18. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		19. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten. 20. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten. 21. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten. 22. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten. 23. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten. 24. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten. 25. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten. 26. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten. 27. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten. 28. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kabupaten. 29. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten. 30. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode 31. Pengawasan peredaran mutu bibit 32. Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit 33. Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit 34. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta 35. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah 36. Bimbingan kastrasi ternak non bibit 37. Pemberian izin produksi bibit 38. Bimbingan produksi bibit 39. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak 40. Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, aklih mudibah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah 41. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta 42. Produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten 43. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri
	7. Pembiayaan	1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten. 2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan(kredit) program wilayah kabupaten. 3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten. 4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten. 5. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten.
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	1. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. 2. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan PAH. 3. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. 4. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari atau ke wilayah kabupaten. 5. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten. 7. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten. 8. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten. 9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 10. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. 11. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 12. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten. 13. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. 14. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. 15. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. 16. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten. 17. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke atau dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten. 18. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. 19. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari atau ke wilayah kabupaten. 20. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan). 21. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan. 22. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. 23. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar. 24. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu. 25. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil). 26. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). 27. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. 28. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual(menular) yang mewabah. 29. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah. 30. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan. 31. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif. 32. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis. 33. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan. 34. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. 35. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten. 36. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. 37. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 38. Sertifikasi keswan yang keluar atau masuk wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		39. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten. 40. Pelaksanaan pelayanan medik (paramedik) veteriner di kabupaten. 41. Pelaporan pelayanan medik (paramedik) veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular atau non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi. 42. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. 43. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan. 44. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar atau masuk wilayah kabupaten. 45. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan 46. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan Tipe C 47. Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan 48. Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan 49. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup kabupaten 50. Penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasiti, bakterawi, virus dan penyakit hewan lainnya 51. Pemetaan penyakit hewan 52. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan 53. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	1. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten. 2. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten. 3. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten. 4. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten. 5. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 6. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten. 7. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten. 8. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten. 9. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggadu wilayah kabupaten. 10. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 11. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggadu. 12. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 13. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 14. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak 15. Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak 16. Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak 17. Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak pemerintah
	10. Perizinan (Rekomendasi)	1. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten. 2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. 3. Pemberian izin praktek dokter hewan. 4. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pendaftaran usaha peternakan. 6. Pemberian izin usaha RPH(RPU) 7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 8. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten. 9. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten. 10. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah kabupaten. 11. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten. 12. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. 13. Pemberian surat keterangan asal (kesehatan) bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 14. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten. 15. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten. 16. Pemberian izin usaha alat angkut (transportasi) produk peternakan. 17. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten. 18. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten 19. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer 20. Pemberian produksi bibit 21. Pemberian izin usaha peternakan 22. Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan 23. Pemberian izin usaha rumah sakit (klinik hewan) 24. Pemberian izin usaha RPH (RPU) kecuali untuk ekspor-impor
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama (kemitraan) usaha peternakan wilayah kabupaten. 2. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten. 3. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten. 4. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten. 5. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten. 6. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten. 7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten. 8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten. 9. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. 10. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan. 11. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten. 12. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten. 13. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal (UKL-UPL) di bidang peternakan wilayah kabupaten. 14. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten. 15. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama (kemitraan) usaha peternakan wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	12. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten. 2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten 3. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan agribisnis 4. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis 5. Bimbingan pemanfaatan kredit agribisnis 6. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan 7. Pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian 8. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten. 4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten. 5. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten
	14. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten. 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten.
4. Perikanan	1. Perikanan air tawar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan pembangunan perikanan lingkup kabupaten 2. Memantau, mengawasi dan melaksanakan pembangunan perikanan di kabupaten 3. Pengkajian dan evaluasi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan perikanan di kabupaten 4. Merencanakan dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan perikanan 5. Mengevaluasi kinerja birokrasi pertanian di kabupaten 6. Memantau dan menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan yang dilaksanakan oleh kabupaten 7. Memberikan bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah air dan rehabilitasi lahan kritis di kawasan perikanan 8. Menetapkan sasaran areal dan lokasi pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan 9. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air 10. Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian eradiksi, analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan dan bimbingan kepada masyarakat petani ikan 11. Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan bimbingan cara penanggulangan hama dan penyakit ikan 12. Menutup dan membuka kembali wilayah wahab 13. Menetapkan pemantauan dan pengawasan kawasan karantina

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 14. Membangun dan mengelola laboratorium tipe B dan C 15. Memberikan bimbingan dan pemanfaatan irigasi pedesaan 16. Menetapkan pemanfaatan lahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan 17. Memberikan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati 18. Ekplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perikanan danau, sungai dan rawa di wilayah kabupaten 19. Mengawasi pemanfaatan sumber daya perikanan darat 20. Memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan spesifikasi perbenihan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode 21. Mengawasi peredaran mutu benih dan memberikan bimbingan produksi 22. Memberikan izin produksi benih ikan 23. Mendistribusikan dan mengelola induk pokok 24. Membangun dan mengelola balai benih ikan (BBI) lokal 25. Memberikan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ikan 26. Mengawasi mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran 27. Memberikan bimbingan peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida 28. Memantau, mengawasi dan menanggulangi dampak, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida 29. Memberikan izin penggunaan pestisida dan pemberian rekomendasi pembuatan, peredaran, penyimpanan dan pemusnahan pestisida 30. Sertifikasi penggunaan pestisida terbatas 31. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin perikanan 32. Memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan 33. Menyusun klasifikasi alat dan mesin perikanan 34. Mendemonstrasikan dan mengkaji terap alat dan mesin perikanan 35. Menyebarkan prototipe alat dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan pada petani 36. Mengawasi mutu, membimbing penggunaan alat dan mesin perikanan serta bengkel alat dan mesin perikanan 37. Membangun dan mengelola Unit Pengembangan Motorisasi Bertahap (UPMB) 38. Peramalan dan perhitungan produksi hasil perikanan 39. Membimbing dan mengawasi penggunaan pupuk dan alat pakan di tingkat petani ikan 40. Memantau dan mengawasi pengadaan pupuk dan atau pakan 41. Memberikan kebijakan pengadaan pupuk dan atau pakan 42. Menyelenggarakan dan mengawasi pasar ikan 43. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan air irigasi untuk budidaya perikanan 44. Mengevaluasi pengelolaan air irigasi perikanan 45. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber air dan air irigasi 46. Membangun dan mengelola pasar ikan 47. Memantau dan mengawasi operasional pasar ikan 48. Memantau dan mengawasi izin usaha

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 49. Memberikan izin usaha pembudidayaan ikan 50. Memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan usaha, pelayanan dan perizinan usaha 51. Memantau dan mengawasi lembaga sistem mutu 52. Memberi bimbingan peningkatan mutu pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil perikanan 53. Melaksanakan promosi komoditas perikanan 54. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa, pelayanan dan menyebarluaskan informasi pasar produk perikanan 55. Memberikan bimbingan analisa usaha tani dan memasarkan hasil perikanan 56. Memberikan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha perikanan dan pencapaian pola kerjasama usaha perikanan 57. Memberikan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil 58. Memberikan bimbingan memantau dan memeriksa higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan 59. Menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan 60. Memantau dan mengevaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan 61. Memberikan bimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan dan bahan pangan asal ikan 62. Menganalisis dan menggulangi residu bahan kimia komoditi hasil perikanan 63. Mengawasi/memberiksa lalu lintas ikan hidup dari atau ke wilayah daerahnya 64. Menyusun ketenagakerjaan perikanan di wilayah kabupaten 65. Melaksanakan kegiatan pendidikan kedinasan 66. Melaksanakan ke diklat petugas sesuai kebutuhan lokalita 67. Membina dan mengembangkan diklat yang dikelola petani ikan 68. Membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan petani ikan, penyuluhan, peneliti dan pengusaha 69. Mengumpulkan data dan informasi SDM di wilayah kabupaten 70. Menyusun program penyuluhan perikanan tingkat kabupaten (BIPP dan BPP) 71. Melaksanakan mimbar saresehan tingkat kabupaten 72. Memberikan bimbingan penerapan teknologi perikanan spesifikasi lokasi 73. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan statistik serta informasi perikanan 74. Mengoperasikan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya
5. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. 2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. 3. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. 4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 5. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. 6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten. 7. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 8. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten. 9. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 10. Identifikasi kelompok rawan pangan. 11. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten. 12. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten. 13. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. 14. Informasi harga di kabupaten. 15. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten. 16. Identifikasi pangan pokok masyarakat. 17. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 18. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. 19. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. 20. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. 21. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 22. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten. 23. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten. 24. Pengembangan "trust fund" di kabupaten. 25. Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan. 26. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten 27. Pemantauan produksi dan ketersediaan/cadangan pangan strategis nabati dan hewani 28. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan cadangan pangan pemerintah 29. Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat 30. Fasilitas pelaksanaan, norma dan standar teknis distribusi pangan 31. Pemantauan, pengkajian dan pengawasan penerapan standar teknis distribusi pangan 32. Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan di wilayah kabupaten 33. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem pangan 34. Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan 35. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan 36. Pemantauan dan pemanfaatan hasil pangan produk rekayasa genetik 37. Pengelolaan sistem jaminan mutu 38. Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat 39. Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan 40. Perumusan langkah-langkah pencegahan dan pengurangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan 41. Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan 42. Pengembangan sumber daya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi 43. Pengkajian, perekayasa dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan 44. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan 45. Peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan 46. Pelaksanaan promosi pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		47. Gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat 48. Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat 49. Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga 50. Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat 51. Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permodalan, pemasaran hasil dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat 52. Pemantauan pola konsumsi masyarakat 53. Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah 54. Fasilitasi penyuluhan dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan wilayah
	2. Keamanan Pangan	1. Penerapan standar BMR wilayah kabupaten. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.
6. Penunjang	1. Karantina Pertanian	
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kabupaten. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kabupaten. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan. 5. Pengelolaan ketenagakerjaan pertanian 6. Pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan di bidang pertanian 7. Pelaksanaan diklat pegawai sesuai kebutuhan lokalita 8. Pengumpulan data dan informasi SDM pertanian 9. Pengkajian SDM pertanian dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program pembangunan pertanian 10. Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelola petani (Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya / P4S) 11. Pelaksanaan pemenuhan akreditasi SPP Daerah / Swasta
	3. Penyuluhan Pertanian	Ketenagaan Penyuluhan : 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tanaman pangan dan hortikultura tingkat kabupaten 2. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten 3. Penyiapan tenaga didik / peserta pendidikan keahlian dan ketrampilan tanaman pangan dan hortikultura. 4. Pengelolaan tenaga kerja pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 5. Pengumpulan data dan informasi SDM pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 6. Pengkajian sumberdaya pertanian dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 7. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 8. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 9. Penumbuhan dan pembinaan penyuluh pertanian swakarsa / swadaya sektor tanaman pangan dan hortikultura.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>Kelembagaan Penyuluhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kelembagaan penyuluh pertanian tanaman pangan dan hortikultura, di kabupaten, kecamatan dan desa sesuai norma dan standar. 2. Penumbuhkembangan, pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 3. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani sektor tanaman pangan dan hortikultura 4. Penumbuhan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani tanaman pangan dan hortikultura wilayah. <p>Penyelenggaraan Penyuluhan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 2. Pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura wilayah kecamatan / desa. 3. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluh pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 4. Perencanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 5. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di tingkat kabupaten . 6. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 7. Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metode dan materi penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura baik dan bentuk cetakan maupun elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita. 8. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan LSM dalam sektor tanaman pangan dan hortikultura. 9. Mempasilitasi, pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani dengan pengusaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 10. Pengelolaan perpustakaan pertanian sektor tanaman pangan dan hortikultura. 11. Bimbingan , pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian sektor tanaman pangan dan hortikultura. 12. Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi teknologi dalam demonstrasi penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura spesifik lokasi. 13. Pemantauan dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di lokasi usaha tani. 14. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran tanaman pangan dan hortikultura oleh petani. 15. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 16. Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran sektor tanaman pangan dan hortikultura sesuai kondisi spesifik lokasi 17. Melaksanakan pengawasan teknologi dan pengujian hasil sektor tanaman pangan dan hortikultura 18. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru dalam sektor tanaman pangan dan hortikultura. 19. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang spesifik lokasi. 20. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka fialisasi penerapan teknologi yang disuluhkan pada sektor tanaman pangan dan hortikultura. 21. Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem sektor tanaman pangan dan hortikultura. 22. Menginventarisasi hasil-hasil penelitian sektor tanaman pangan dan hortikultura yang dilakukan oleh lembaga penelitian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>23. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAK dalam sektor tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>24. Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi tanaman pangan dan hortikultura di tingkat petani.</p> <p>Sarana dan Prasarana Penyuluhan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian sektor tanaman pangan dan hortikultura Membimbing kesuadayaan petani untuk mengembangkan alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang dimiliki petani. Melakukan kaji ulang alat mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang telah direkomendasikan secara periodik. Mendorong tumbuh kembangnya kemandirian petani/kelompoktani dalam memenuhi sarana dan prasarana kelembagaan tani sektor tanaman pangan dan hortikultura. <p>Pembiayaan Penyuluhan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempasilitasi kebutuhan biaya penyuluhan pertanian tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam rangka meningkatkan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura. Mempasilitasi akses petani dan kelompoktani terhadap lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit/pinjaman pada sektor tanaman pangan dan hortikultura. Membina petani dan kelompok tani sektor tanaman pangan dan hortikultura dalam mengelola keuangan.
	4. Penyuluhan Peternakan	<p>Ketenagaan Penyuluhan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan kebijakan SDM pertanian sektor peternakan tingkat kabupaten. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten. Penyimpangan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan sektor peternakan. Pengelolaan ketenagakerjaan pertanian sektor-sektor peternakan. Pengumpulan data dan informasi SDM pertanian sektor peternakan. Pengkajian SDM pertanian dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program pembangunan pertanian sektor peternakan. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian sektor peternakan. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian sektor peternakan. Penumbuhan dan pembinaan penyuluh pertanian swakarsa/swadaya sektor peternakan. <p>Kelembagaan Penyuluhan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan kelembagaan penyuluhan sektor peternakan di kabupaten, kecamatan dan desa sesuai norma dan standar. Penumbuh kembangan, pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian sektor peternakan. Pemeliharaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani sektor peternakan. Penumbuhan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani sektor peternakan. <p>Penyelenggaraan Penyuluhan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian sektor peternakan. Pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian sektor peternakan wilayah kecamatan/desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian sektor peternakan. 4. Perencanaan penyuluhan pertanian sektor peternakan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 5. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian sektor peternakan di tingkat kabupaten. 6. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian sektor peternakan. 7. Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metode dan materi penyuluhan pertanian sektor peternakan baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita. 8. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan LSM dalam sektor peternakan. 9. Memfasilitasi, pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani dengan pengusaha pertanian sektor peternakan. 10. Pengelolaan perpustakaan pertanian sektor peternakan. 11. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian sektor peternakan. 12. Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi teknologi dalam demonstrasi penerapan teknologi pertanian sektor peternakan spesifik lokasi. 13. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian sektor peternakan dilokasi usaha tani. 14. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran sektor peternakan oleh petani. 15. Melakukan pembinaan penerapan teknologi pertanian sektor peternakan. 16. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru dalam sektor pertanian. 17. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian sektor peternakan yang spesifik lokasi. 18. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka fisualisasi penerapan teknologi yang di suluhkan pada sektor peternakan. 19. Mengedintifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem sektor peternakan. 20. Menginventarisasi hasil-hasil penelitian sektor peternakan yang dilakukan oleh lembaga penelitian. 21. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAK dalam sektor peternakan. 22. Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi sektor peternakan di tingkat petani. <p>Sarana dan Prasarana Penyuluhan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan, perkembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian sektor peternakan. 2. Membimbing keswadayaan petani untuk mengembangkan alat dan mesin pertanian sektor peternakan yang di miliki petani. 3. Melakukan kaji ulang alat mesin pertanian sektor peternakan yang telah di rekomendasikan secara periodik. 4. Mendorong tumbuh kembangannya kemandirian petani/kelompok tani dalam memenuhi sarana dan prasarana kelembagaan tani sektor peternakan. <p>Pembiayaan Penyuluhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi kebutuhan biaya penyuluhan pertanian tingkat 2. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor peternakan. 3. Memfasilitasi askes petani dan kelompok tani terhadap lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit/pinjaman pada sektor peternakan. 4. Membina petani dan kelompok tani sektor peternakan dalam mengelola keuangan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	5. Penyuluhan Perikanan	<p>Ketenagaan Penyuluhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian sektor perikanan tingkat kabupaten. 2. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten. 3. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan sektor perikanan. 4. Pengelolaan ketenagakerjaan pertanian sektor perikanan. 5. Pengumpulan data dan informasi SDM pertanian sektor perikanan. 6. Pengkajian SDM pertanian dalam rangka evaluasi dampak kebiijakan program pembangunan pertanian sektor perikanan. 7. penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian sektor perikanan. 8. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian sektor perikanan. 9. Penumbuhan dan pembinaan penyuluh pertanian swakarsa / swadaya sektor perikanan. <p>Kelembagaan Penyuluhan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kelembagaan penyuluhan sektor perikanan di kabupaten, kecamatan dan desa sesuai norma dan standar. 2. Penumbuhkembangan, pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian sektor perikanan. 3. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani Sektor perikanan. 4. Penumbuhan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan Petani sektor perikanan. <p>Penyelenggaraan Penyuluhan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian sektor perikanan. 2. Pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian sektor Perikanan wilayah kecamatan / desa. 3. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian sektor peternakan. 4. Perencanaan penyuluhan pertanian sektor peternakan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 5. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian sektor peternakan di tingkat kabupaten. 6. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian sektor peternakan. 7. Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metode dan materi penyuluhan pertanian sektor perikanan baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita 8. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, penelitian LSM dalam sektor perikanan. 9. Memfasilitasi, pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani dan pengusaha pertanian dan sektor pertanian 10. Pengelolaan perputakaan pertanian sektor perikanan 11. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian sektor pertanian. 12. Pembinaan, supervisi an akselerasi, aplikasi teknologi dalam demontsrasi penerapan teknologi pertanian sektor perikanan spesifikasi lokasi. 13. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian sektor perikanan di lokasi usaha tani. 14. Melaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi anjuran sektor perikanan oleh petani. 15. Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi pertanian sektor perikanan. 16. Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran sesuai kondisi spesifikasi lokalita. 17. Melaksanakan pengawasan teknologi dan pengujian hasil sektor perikanan. 18. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru dalam sektor Perikanan. 19. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian Sektor perikanan yang spesifik lokasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>20. Mengadakan kerjasama dengan sumber – sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan</p> <p>21. pada sektor perikanan.</p> <p>22. Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem sektor perikanan.</p> <p>23. Menginventarisasi hasil hasil penelitian sektor perikanan yang dilakukan oleh lembaga penelitian.</p> <p>24. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAK dalam sektor perikanan.</p> <p>25. Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi sektor perikanan di tingkat petani.</p> <p>Sarana dan Prasarana Penyuluhan :</p> <p>1. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana Penyuluhan pertanian sektor perikanan.</p> <p>2. Membimbing keswadayaan petani untuk mengembangkan alat Dan mesin pertanian sektor perikanan yang dimiliki petani.</p> <p>3. Melakukan kaji ulang alat mesin pertanian sektor perikanan yang telah direkomendasikan secara periodik.</p> <p>4. Mendorong tumbuhkembangnya kemandirian petani/kelompok tani dalam memenuhi sarana dan prasarana kelembagaan tani sektor perikanan.</p> <p>Pembiayaan Penyuluhan :</p> <p>1. Memfasilitasi kebutuhan biaya penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor perikanan.</p> <p>2. Memfasilitasi akses petani dan kelompok tani terhadap Lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit/pinjaman pada sektor perikanan.</p> <p>3. Membina petani dan kelompok tani sektor perikanan dalam mengelola keuangan.</p>
	6. Penyuluhan Perkebunan	<p>Ketenagaan Penyuluhan :</p> <p>1. Penetapan kebijakan SDM pertanian sektor perkebunan tingkat Kabupaten.</p> <p>2. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten.</p> <p>3. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan sektor perkebunan.</p> <p>4. Pengelolaan ketenagakerjaan pertanian sektor perkebunan.</p> <p>5. Pengumpulan data dan informasi SDM pertanian sektor Perkebunan.</p> <p>6. Pengkajian SDM pertanian dalam rangka evaluasi dalam</p> <p>7. kebijakan program pembangunan pertanian sektor</p> <p>8. perkebunan.</p> <p>9. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan</p> <p>10. Penyuluh pertanian sektor perkebunan.</p> <p>11. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian sektor perkebunan.</p> <p>12. Penumbuhan dan pembinaan penyuluh pertanian swakarsa/Swadaya sektor perkebunan.</p> <p>Kelembagaan Penyuluhan :</p> <p>1. Penetapan kelembagaan penyuluhan sektor perkebunan di Kabupaten, kecamatan dan desa sesuai norma dan standar.</p> <p>2. Penumbuhkembangan, pembinaan dan pengelolaan penyuluhan pertanian sektor perkebunan.</p> <p>3. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani sektor perkebunan.</p> <p>4. Penumbuhan, pembinaan dan pengembangan kelembagaanpetani sektor perkebunan.</p> <p>Penyelenggaraan Penyuluhan :</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian Sektor perkebunan. 2. Pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian sektor Perkebunan wilayah kecamatan/desa. 3. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan 4. Pertanian sektor perkebunan. 5. Perencanaan penyuluhan pertanian sektor perkebunan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian sektor perkebunan di tingkat kabupaten. 7. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan Pertanian sektor perkebunan. 8. Penyusunan, perbanyak dan penyebaran metode dan materi penyuluhan pertanian sektor perkebunan baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik sesuai dengan kebutuhan lokakita. 9. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, 10. Penyuluh, peneliti dan LSM dalam sektor perkebunan. 11. Memfasilitasi, pembinaan dan pengembangan kerjasama 12. Kemitraan petani dengan pengusaha pertanian sektor Perkebunan. 13. Pengelolaan perpustakaan pertanian sektor perkebunan. 14. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan Teknologi hasil penelitian dan pengkajian sektor perkebunan. 15. Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi teknologi dalam demonstrasi penerapan teknologi pertanian sektor perkebunan spesifik lokasi . 16. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian sektor perkebunan di lokasi usaha tani. 17. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan Teknologi anjuran sektor perkebunan oleh petani. 18. Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi pertanian Sektor perkebunan. 19. Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran perkebunan sesuai kondisi spesifikasi lokalita. 20. Melaksanakan pengawasan teknologi dan pengujian hasil sektor perkebunan. 21. Mempelajari temuan – temuan teknologi baru dalam sektor Perkebunan. 22. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian sektor perkebunan yang spesifik lokasi. 23. Mengadakan kerjasama dengan sumber – sumber teknologi dalam rangka visualisai penerapan teknologi yang disuluhkan pada sektor perkebunan. 24. Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem sektor Perkebunan. 25. Menginventarisasi hasil – hasil penelitian sektor perkebunan yang dilakukan oleh lembaga penelitian. 26. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAK dalam sektor perkebunan. 27. Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi Sektor perkebunan ditingkat petani. <p>Sarana dan Prasarana Penyuluhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana Penyuluhan pertanian sektor perkebunan. 2. Membimbing keswadayaan petani untuk mengembangkan Alat dan mesin pertanian sektor perkebunan yang dimiliki Petani. 3. Melakukan kaji ulang alat mesin pertanian sektor perkebunan yang telah direkomendasikan secara periodik. 4. Mendorong tumbuhkembangnya kemandirian petani/kelompok tani dalam memenuhi sarana dan prasarana kelembagaan Tani sektor perkebunan. <p>Pembiayaan Penyuluhan :</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi kebutuhan biaya penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa dalam rangka meningkatkan 2. Produktivitas sektor perkebunan. 3. Memfasilitasi akses petani dan kelompok tani terhadap lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit pinjaman pada sektor perkebunan. 4. Membina petani dan kelompok tani sektor perkebunan dalam mengelola keuangan. 5. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 6. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 7. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar. 8. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 9. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 10. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 11. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten 12. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian 13. Penyusunan, perbanyak dan penyebaran metoda penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita 14. Penumbuhkembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani 15. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan LSM 16. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian 17. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh pertanian 18. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani 19. Pengelolaan perpustakaan pertanian 20. Pengadaan, pengembangan dna pemeliharaan sarana penyuluh pertanian
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian. 2. Analisa teknik, ekonomis dan sisio budaya alat dan mesin pertanian 3. Rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita 4. Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi teknologi dalam demonstrasi penetapan tekonologi pertanian spesifik lokasi 5. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian lokasi 6. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani 7. Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi 8. Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifikasi lokalita 9. Melakukan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodik 10. Melakukan pengawasan teknologi dan pengujian hasil 11. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru 12. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian spesifikasi lokasi 13. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka fisualisasi penerapan teknologi yang suluhkan 14. Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem 15. Menginventarisir hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		16. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAK 17. Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi di tingkat petani
	8. Perlindungan Varietas	1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten 3. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan 4. Bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan OPT kepada masyarakat 5. Pengumpulan dan pengolahan data OPT dan agroklimat 6. Bimbingan jasa perlindungan tanaman 7. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya 8. Pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT 9. Menetapkan larangan pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit tanaman 10. Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati 11. Bimbingan, pengelolaan dan onservasi agens hayati 12. Pengawasan penggunaan pestisida 13. Penetapan areal puso dan atau eksploitasi karena serangan organisme pengganggu tanaman dan bencana banjir serta kekeringan 14. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman 15. Pengendalian eksplosi hama dan penyakit 16. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian 17. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian 18. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman 19. Pengelolaa laboratorium hama dan penyakit
	9. Sumber Daya Genetik (SDG)	1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.
	10. Standarisasi dan Akreditasi	1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten. 7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten. 8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kabupaten. 9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten. 11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten

N. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten: - Forum peningkatan kualitas hidup perempuan (PKHP) 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dengan SKPD terkait, organisasi kemasyarakatan, LSM, Tokoh Agama, Organisasi Politik dan Organisasi Profesi skala kabupaten. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten: a. Evaluasi modal UP2K; b. Reward kepada kader posyandu; c. Bantuan operasional rujukan di lokasi Desa Siaga; d. Memberikan bantuan pembrantasan buta aksara perempuan 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin bekerjasama dengan BPS skala kabupaten
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten : - Pembuatan DPA untuk kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas hidup perempuan di SKPD
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan tentang perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
	5. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten. 2. Pembangunan Rumah Singgah bagi anak-anak korban kekerasan
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten : a. Pemberian bantuan stimulan kepada kelompok usaha ekonomi perempuan produktif; b. Pemberian keterampilan bagi anak-anak korban kekerasan
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten.
5. Data Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional
	2. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) melalui media luar ruang skala kabupaten.

O. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
<p>1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. 3. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten. 4. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. 5. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. 6. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. 7. Pemantauan tingkat drop out peserta KB. 8. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. 9. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. 10. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. 11. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). 12. Pembinaan penyuluh KB. 13. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 14. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten. 15. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten. 16. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten. 17. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten. 18. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB 19. Penetapan kebijakan jaminan penyediaan alat obat kontrasepsi bagi keluarga miskin skala kabupaten; 20. Peningkatan mutu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
<p>2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten. 3. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 5. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 6. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten. 7. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten. 8. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten. 9. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 10. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten. 12. Penyelenggaraan pelayanan pusat informasi dan konsultasi (PIK) KRR
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 3. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 4. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten. 5. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten. 6. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 7. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 8. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten. 9. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten. 10. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten. 11. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten. 12. Pelaksanaan promosi produk kelompok UPPKS 13. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan kelompok UPPKS dan Asosiasi kelompok UPPKS skala kabupaten; 14. Pengelolaan data ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga. 15. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten. 3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. 5. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. 6. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. 7. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerak institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. 8. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 9. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. 10. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. 11. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. 12. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. 13. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. 14. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. 15. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten. 16. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. 17. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten. 18. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten. 19. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
<p>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten. 3. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten. 4. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten. 5. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. 6. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. 7. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. 8. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi. 9. Penetapan petunjuk teknis advokasi KIE Program KB, KRR, Ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten 10. Pelaksanaan pembinaan teknis KIE/konseling Program KB, KRR, Ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 11. Pelaksanaan promosi kelembagaan dan pembudayaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera 12. Penyediaan dukungan operasional tenaga KIE Program KB, KRR, Ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten 13. Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan KIE Program KB, KRR, Ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten 14. Pelaksanaan distribusi sarana dan prasarana KIE Program KB, KRR, Ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten
<p>6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten. 3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten. 4. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten. 5. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. 7. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. 8. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. 9. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi. 10. Pelaksanaan operasional Sistem Informasi Kependudukan Keluarga (SIDUGA): 11. Pengolahan data pengendalian Program KB; 12. Pengolahan data pelayanan kontrasepsi
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten. 3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten. 4. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.

P. BIDANG PERHUBUNGAN (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten. 2. Penyusunan tatanan transportasi lokal 3. Izin usaha perbengkelan di Kabupaten Majalengka 4. Pengujian kendaraan bermotor 5. Pengelolaan penerangan jalan umum 6. Pengelolaan alat pengendalian syarat lalu lintas 7. Penyusunan ANDAL LALIN 8. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 9. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 10. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 11. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 12. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 13. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 14. Pembangunan terminal angkutan barang. 15. Pengoperasian terminal angkutan barang. 16. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. 17. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten. 18. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota. 19. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten. 20. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. 21. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten. 22. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 23. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 24. Pemberian izin usaha angkutan barang. 25. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten. 26. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten. 27. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten. 28. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten. 29. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten. 30. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten. 31. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 32. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 33. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 34. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran Perda Kabupaten Majalengka bidang LLAJ: 35. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. 36. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. 37. Perizinan angkutan umum. 38. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten. 39. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 40. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor. 41. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten. 42. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. 43. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. 44. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. 45. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi. 46. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder (kabupaten) 47. Penyusunan dan penetapan kelas jalan di jalan kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		48. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C 49. Penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang 50. Penetapan lokasi terminal barang 51. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor 52. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan 53. Pemberian izin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor 54. Penyusunan jaringan trayek angkutan kota 55. Penyusunan jaringan trayek angkutan pedesaan 56. Pemberian izin trayek angkutan kota 57. Pemberian izin trayek angkutan pedesaan 58. Pemberian izin usaha angkutan penumpang dan izin usaha angkutan barang 59. Pemberian izin operasi Taksi yang melayani wilayah kota 60. Pemberian izin usaha angkutan sewa 61. Penetapan tarif angkutan kota kelas ekonomi 62. Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten 63. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di dalam ibukota kabupaten/wilayah kota 64. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum 65. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum 66. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di dalam ibukota kabupaten 67. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di dalam ibukota kabupaten/wilayah kota 68. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten 69. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten 70. Pemberian usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi
2. Perkeretaapian		1. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten. 2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi : a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten; b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten /kota.
		1. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api. 2. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten /kota. 4. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah. 5. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten/ kota. 6. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten. 7. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten. 8. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten. 9. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten
3. Perhubungan Udara	Bandar Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum. 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 3. Rekomendasi ketinggian banyunan dalam radius KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) 4. Penetapan / izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.

Q. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen. 5. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen. 6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannya 7. Pengujian terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi dapat dilakukan oleh Balai Uji di daerah kabupaten 8. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan pengadaan alat/perangkat postel
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi. 8. Penerbitan izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G) 9. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal 10. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal 11. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat khusus 12. Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten. 3. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalasi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalasi genset.
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
2. Sarana	1. Penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	Pelayanan rekomendasi perizinan pendirian radio siaran, TV dan stasiun relay
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional. 2. Pengawasan dan penerbitan film dan radio 3. Pelayanan perizinan penjualan dan pengawasan laser disk, vcd, dvd 4. Pelayanan perizinan pameran 5. Penyelenggaraan pameran
	5. Kemitraan Media	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten 2. Penyusunan program dan penyelenggaraan informasi melalui media penerbitan, elektronik, tradisional dan media baru 3. Penyebaran informasi melalui media luar seperti spanduk, baligo, billboard dan gambar dinding 4. Melaksanakan penyiaran 5. Menyiarkan informasi-informasi pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa 7. Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berperan serta dalam program pembangunan 8. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi informasi 9. Melaksanakan kontrol kualitas yang akan disajikan melalui internet 10. Memelihara konektivitas jaringan internet isp pemda Kabupaten Majalengka

R. BIDANG PERTANAHAN (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Izin Lokasi		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. 2. Kompilasi bahan koordinasi. 3. Pelaksanaan rapat koordinasi. 4. Pelaksanaan peninjauan lokasi. 5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. 6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. 7. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. 8. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten. 9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah. 10. Pemberian ijin lokasi 11. Perpanjangan izin lokasi, bagi pemohon yang belum melaksanakan peralihan hak atas tanah sampai batas waktu yang ditentukan
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi. 2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi. 4. Pelaksanaan inventarisasi tanah dan pemilki tanah. 5. Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah 6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. 7. Pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 8. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. 9. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 10. Pelaksanaan pelepasan hak atas tanah dan pembuatan sertifikat ke Kantor Pertanahan dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		11. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. 2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. 3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. 4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. 5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak 6. Penyelesaian sengketa tanah garapan
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia. 2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. 4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia. 5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. 6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian. 7. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
6. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. 2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. 3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. 4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. 5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian
7. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. 2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. 3. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten. 4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. 5. Pemberian ijin membuka tanah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
8. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten. 2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. b. Rencana Tata Ruang Wilayah. c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta. 3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. 4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. 6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota. 9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. 10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan 11. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten
9. Penertiban tukar menukar tanah kas desa		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penertiban tanah kas desa 2. Penerimaan usulan penertiban tanah kas desa 3. Pelaksanaan peninjauan ke lokasi 4. Pembuatan surat persetujuan bupati tentang penerbitan tanah kas desa 5. Evaluasi pembuatan Perdes tentang penertiban tanah kas desa

S. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
6. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten
	d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
	e. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten
4. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten
6. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
7. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten

T. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan: a. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten 2. Penetapan produk hukum daerah 3. Penyelenggaraan bantuan hukum dan sengketa hukum baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan
	b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten
	c. Harmonisasi	1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Harmonisasi produk hukum daerah 3. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi. 4. Dokumentasi produk hukum daerah, Penyelenggaraan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hukum (SJDI) 5. Penyelenggaraan sosialisasi perda, pembinaan desa sadar hukum
	d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1. Penyusunan LPPD kabupaten 2. Penyampaian LPPD kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur
	e. Database	Pengolahan database LPPD skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): a. Kebijakan	1. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
	b. Pembentukan Daerah	1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 2. Pembentukan kecamatan. 3. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah. 4. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.
	c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. 2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus
	d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus	1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten
	e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus	1. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala kabupaten. 2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah
	f. Pelaporan	1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. 2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten. 3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur
	3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): a. DPOD	1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD
	b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	1. Penyusunan Perda kabupaten. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur. 3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi
	c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan	Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	Kerjasama Daerah	
	4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah: a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Kebijakan dan Pembinaan	1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten. 2. Penerapan SPM kabupaten
	b. Pengembangan Kapasitas Daerah : Kebijakan, Pelaksanaan, dan Pembinaan	1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten. 3. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten. 4. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten. 5. Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten.
	5. Pejabat Negara: a. Tata Tertib DPRD: kebijakan, pembinaan	1. fasilitasi penyusunan pedoman tata tertib DPRD Kabupaten Majalengka 2. Penetapan pedoman tata tertib DPRD Kabupaten Majalengka
	b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH: kebijakan, pelaksanaan	1. Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati 2. Fasilitasi fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan
	c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD: kebijakan, pembinaan	1. Fasilitasi penyusunan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten 2. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD 3. Fasilitasi sarana prasarana DPRD 4. Penyiapan rencana perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dan perbekalan 5. Pengelolaan keanggotaan DPRD dan kepegawaian sekretariat DPRD 6. Pelaksanaan pembuatan risalah 7. Fasilitasi penyelenggaraan reses
	d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: kebijakan, pembinaan	Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.
	e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati/walikota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	(LKPJ) KDH: kebijakan, pembinaan	
2. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:	
	a. Fasilitasi Tugas Pembantuan	1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa
	b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	1. Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi
	c. Kerjasama Antar Daerah	4. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten 5. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten kepada provinsi
	d. Pembinaan Wilayah	1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten
	e. Koordinasi Pelayanan Umum	Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten
	2. Trantibum dan Linmas :	–
	a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Kepolisipamongprajaan dan PPNS, Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten. 3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten. 5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten 6. Pengamanan daerah, pengamanan pimpinan daerah, pengamanan daerah waktu tertentu 7. Pengamanan gedung negara dan gedung DPRD 8. Pengamanan rumah dinas Wabup dan Sekda 9. Pengamanan gedung negara
	b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten 2. Sosialisasi RANHAM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	3. Wilayah Perbatasan:	
	a. Perbatasan Daerah	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten
	b. Toponimi dan Pemetaan Wilayah	1. Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten. 2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten. 3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten
	c. Pengembangan Wilayah Perbatasan	1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten. 2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten. 3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten
	d. Penetapan Luas Wilayah	1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi. 2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya
	e. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten
	f. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten
	g. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten
	h. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kedirgantaraan skala kabupaten
	4. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:	
	a. Mitigasi Pencegahan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	b. Penanganan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten
	c. Penanganan Pasca Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten
	d. Kelembagaan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten
	e. Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten
3. Pengawasan Pemerintahan	1. Penetapan Kebijakan Pengawasan Skala Kabupaten.	
	a. Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kemampuan Aparatur. 2. Pelaksanaan Koordinasi Antar Lembaga Pengawasan. 3. Peningkatan Kualitas Pemeriksaan.
	2. Penetapan Ruang Lingkup Pengawasan.	
	a. Administrasi Umum Pemerintahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kebijakan Daerah. 2. Pemeriksaan Kelembagaan. 3. Pemeriksaan Pegawai Daerah. 4. Pemeriksaan Keuangan Daerah. 5. Pemeriksaan Barang Daerah.
	b. Urusan Pemerintahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Wajib. 2. Urusan Pilihan. 3. Dana Dekonsentrasi. 4. Tugas Pembantuan. 5. Kebijakan pinjaman hibah Luar Negeri.
	c. Insidentil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atas perintah. 2. Pemeriksaan atas pemberitaan Media Masa. 3. Pemeriksaan atas pengaduan Masyarakat.
	3. Penyusunan Rencana / Program Pengawasan.	
	a. Program Kerja Pengawasan Tahunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Rencana Pengawasan. 2. Pengolahan Data. 3. Penyusunan ruang lingkup dan sasaran Pengawasan. 4. Penyusunan waktu dan tenaga Pengawasan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	4. Pelaksanaan Pemeriksaan	
	a. Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan PKP. 2. Pengumpulan bahan materi Pengawasan. 3. Penyusunan langkah-langkah kerja. 4. Menentukan waktu dan Aparat Pengawas. 5. Melaksanakan Koordinasi.
	b. Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entri breafing. 2. Pemeriksaan Administrasi. 3. Uji materi. 4. Koordinasi dengan pihak lain. 5. Penyusunan daftar temuan dan rekomendasi. 6. Ekspose hasil pemeriksaan.. 7. Pembahasan hasil pemeriksaan intern.
	5. Pelaporan	
	a. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). 2. Pembahasan KKP. 3. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
	b. Pengiriman Laporan	Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Bupati dan tembusan sesuai dengan ketentuan.
	c. Tindak lanjut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusun Tim Tindak Lanjut. 2. Melaksanakan Pemutahiran Data. 3. Evaluasi.
	6. Penyusunan Anggaran Pemeriksaan.	
	a. Penyusunan Rencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. 2. Penelaahan Renstra, Renja dan PKPT
	b. Pelaksanaan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Anggaran. 2. Pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Anggaran
	7. Koordinasi dan Fasilitasi Pengawasan.	
	a. Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi Pengawasan. 2. Fasilitasi Pengawasan dengan SKPD. 3. Koordinasi dan Fasilitasi dengan APIP.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	b. Eksternal	1. Fasilitasi Pengawasan di luar APIP. 2. Fasilitasi dengan Aparat Penegak Hukum .
	8. Penyusunan Norma dan Kode Etik Pengawasan	
	a. Ruang lingkup Kode Etik	1. Kode Etik internal (antar Auditor). 2. Kode Etik Eksternal (terhadap auditan dan atau masyarakat). 3. Kode Etik Auditor secara individual..
	b. Sanksi	Penjatuhan Hukuman disiplin.
4. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten
	2. Anggaran Daerah	1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten. 1. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 2. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. 4. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 5. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara kabupaten dan desa. 6. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa. 7. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah: a. Pajak dan Retribusi Daerah	1. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten 2. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten. 3. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak retribusi daerah 4. Pendataan objek dan subjek pajak/retribusi daerah 5. Perhitungan pajak resmi retribusi yang dituangkan dalam nota perhitungan pajak/retribusi daerah 6. Penerbitan surat ketetapan pajak /retribusi (SKPD/SKRD) 7. Pendistribusian SKPD/SKRD kepada wajib pajak/retribusi 8. Penagihan pajak / retribusi daerah sesuai ketetapan pajak/retribusi 9. Penyetoran hasil penagihan kepada bendahara penerima sesuai ketetapan 10. Pembukuan hasil penerimaan pajak/retribusi daerah 11. Melaporkann hasil penerimaan pajak/retribusi daerah 12. Memfasilitasi wajib pajak/retribusi dalam pelaksanaan pembayaran pajak/retribusi daerah 13. Monitoring objek dan subjek pajak / retribusi daerah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	<p>b. Investasi dan Aset Daerah</p> <p>c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro</p>	<p>14. Mengevaluasi penerimaan pajak /retribusi daerah</p> <p>15. Sosialisasi kepada wajib pajak / retribusi untuk mentaati segala peraturan yang berlaku</p> <p>16. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten.</p> <p>17. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.</p> <p>4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa</p> <p>4. Penetapan kebijakan kerjasama antara BUMD, LKM dengan badan usaha swasta, dan atau dengan perbankan / lembaga pembiayaan lainnya</p> <p>5. Penetapan kebijakan pendirian / pembentukan, penggabungan, akuisisi dan pembubaran BUMD</p> <p>6. Penetapan penyertaan modal kepada BUMD, LKM</p>
	<p>d. Pinjaman Daerah</p> <p>4. Dana Perimbangan :</p> <p>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</p> <p>c. Dana Bagi Hasil (DBH)</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.</p> <p>3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten</p> <p>1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten.</p> <p>2. Pengelolaan DAU kabupaten.</p> <p>3. Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten</p> <p>1. Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK</p> <p>2. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK).</p> <p>3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK</p> <p>1. Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten.</p> <p>2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH</p>
	<p>5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p>	<p>1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa.</p> <p>2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB desa</p> <p>3. Evauasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.</p> <p>4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama (urusan concurrent).</p> <p>5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB Desa</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
5. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten, meliputi antara lain pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan perangkat daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai pembentukan pengembangan penghapusan perangkat daerah . 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten meliputi antara lain, penyusunan dan penetapan uraian hasil analisis tugas pokok dan fungsi kelembagaan perangkat daerah, penyusunan dan penetapan peraturan/keputusan Bupati yang berkaitan dengan kelembagaan perangkat daerah. 4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten. Meliputi antara lain : penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Negara 5. Tata kerja perangkat daerah; 6. Perumusan tata hubungan kerja antar satuan kerja perangkat daerah dan antar unit pemerintah Kabupaten Majalengka; 7. Pedoman kerja, petunjuk kerja dan tata cara kerja perangkat daerah; 8. Pengaturan jam kerja perangkat daerah; 9. Petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat (waskat); 10. Program budaya kerja dan penerapan disiplin aparatur; 11. Sistem dan prosedur kerja perangkat daerah; 12. Pembakuan pakaian dinas; 13. Pedoman tata naskah dinas; 14. Pedoman standar operasional prosedur perangkat daerah; 15. Standar penilaian kompetensi peningkatan kualitas pelayanan publik antar unit kerja perangkat daerah; 16. Standar pelayanan dan standar kinerja perangkat daerah; 17. Pedoman peningkatan pelayanan publik; 18. Kebijakan umum pengembangan budaya kerja; 19. Pelaporan akuntabilitas dan perencanaan kinerja Sekretariat Daerah; 20. Pedoman sistem pengendalian manajemen; 21. Bahan pembinaan dan penyempurnaan ketatalaksanaan pemerintah daerah; 22. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten meliputi antara lain Penyusunan/Penetapan Keputusan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Rumpun Jabatan Fungsional PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Formasi Jabatan Fungsional PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka., Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Uraian Tugas Jabatan Struktural SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Nama-nama Jabatan Fungsional Umum SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kode Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kab. Majalengka .
	2. Pengembangan Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten. 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah, meliputi antara lain identifikasi potensi perubahan/pengembangan perangkat daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	3. Pembinaan dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah 2. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan provinsi mengenai pembentukan/perubahan perangkat daerah 3. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, pelayanan konsultasi mengenai perangkat daerah kabupaten
	4. Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah, meliputi antara lain Inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan kelembagaan perangkat daerah, penyusunan/penyediaan instrumen evaluasi perangkat daerah 2. Penyediaan bahan database perangkat daerah skala kabupaten
6. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten 2. Usulan penetapan NIP
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten 2. Penyelenggaraan Sumpah/Janji PNS.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten yang meliputi antara lain diklat struktural, fungsional, teknis/substantif. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten. 3. Pelaksanaan diklat skala kabupaten yang meliputi antara lain diklat struktural, fungsional, teknis/substantif. 4. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan diklat aparatur 5. Koordinasi /kerjasama kediklatan dengan instansi pembina, lembaga diklat lain dan perguruan tinggi
	6. Kenaikan Pangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian. 3. Usulan Kenaikan Pangkat menjadi Gol. Ruang IV/a s/d IV/b 4. Usulan Kenaikan Pangkat menjadi Gol. Ruang IV/c ke atas.
	7. Kenaikan Gaji Berkala	Penetapan KGB
	8. Administrasi Kepegawaian	Fasilitasi Pembuatan KARPEG, KARIS/KARSU
	9. Daftar Nominatif dan DUK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Daftar Nominatif PNS 2. Penyusunan DUK PNS
	10. Registrasi Tenaga Honorar	Penetapan Perpanjangan PTT.
	11. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten. 2. Jabatan Struktural : <ol style="list-style-type: none"> a. Menginventarisir jabatan Struktural yang kosong akibat Pejabat Pensiun, indisipliner atau meninggal dunia.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Menyusun laporan kekosongan Jabatan Struktural untuk bahan Rapat BAPERJAKAT c. Menyiapkan bahan-bahan Rapat BAPERJAKAT d. Penyusunan Usulan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural hasil sidang BAPERJAKAT yang disampaikan kepada Bupati Majalengka. e. Pelantikan Pejabat Struktural oleh Bupati Majalengka 3. Jabatan Fungsional : <ul style="list-style-type: none"> a. Menginventarisir kekosongan formasi jabatan Fungsional sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Majalengka. b. Pemberitahuan / Mengumumkan kekosongan Formasi Jabatan Fungsional ke tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. c. Penyelenggaraan Seleksi atau Penelitian Penyerahan Usul Pengangkatan ke dalam jabatan Fungsional baik pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali atau melalui Pemindahan Jabatan d. Pemberitahuan lengkap tidaknya Persyaratan kepada pimpinan SKPD yang mengusulkan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional e. Penyusunan Usul Pengangkatan Jabatan Fungsional kepada Bupati Majalengka f. Penyerahan keputusan Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional kepada pihak-pihak yang berkepentingan 4. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten. berdasarkan Peraturan per Undang-Undang dan syarat lainnya. <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian Usulan Pengangkatan, Pemindahan & Pemberhentian Sekda Kabupaten Majalengka kepada Gubernur Jawa Barat untuk dinilai dan diproses lebih lanjut. 5. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten berdasarkan eraturan perundangan-undangan yang berlaku dan syarat lainnya. Berdasarkan hasil penilaian, Gubernur menyampaikan calon Pejabat Struktural Eselon II kepada Bupati Majalengka untuk ditetapkan.
	12. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan perpindahan PNSD kabupaten. <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan Permohonan Perpindahan PNS baik yang akan masuk ke Pemkab Majalengka atau yang akan ke luar Pemkab Majalengka b. Penelitian formasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. c. Apabila formasi PNS masih kurang sesuai dengan kompetensi PNS yang mengajukan pindah maka akan di tolak d. Apabila formasi PNS lebih sesuai dengan kompetensi PNS yang mengajukan pindah maka diterima
	13. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten.
	14. Disiplin Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> 1. Proses penanganan Disiplin Pegawai 2. Pembinaan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka 3. Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil
	15. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	16. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah
	17. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten. 2. Pemberitahuan kepada SKPD tentang PNS yang akan pensiun 1 (satu) tahun lagi. 3. Menerima berkas pengajuan pensiun dari SKPD 4. Memeriksa berkas pengajuan pensiun 5. Mengirimkan berkas pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) dan meninggal bagi PNS golongan IV b ke bawah ke BKN Regional III Bandung 6. Mengirimkan berkas pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) dan meninggal bagi PNS golongan IV c ke atas kepada Presiden 7. Mengirimkan berkas pensiun Atas Permohonan Sendiri (APS) bagi PNS golongan IV a dan IV b kepada Gubernur 8. Mengirimkan berkas pensiun Atas Permohonan Sendiri (APS) bagi PNS golongan III d ke bawah kepada Bupati 9. Mengirimkan berkas pensiun Atas Permohonan Sendiri (APS) bagi PNS golongan IV c ke atas kepada Presiden 10. Menerima Surat Keputusan Pensiun 11. Menyerahkan SK kepada yang bersangkutan 12. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang pensiun, berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Piagam penghargaan b. Cinderamata c. Uang Kadeudeuh
	18. Kesejahteraan Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan biaya perawatan <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan keterangan sakit dan dirawat b. Memberikan bantuan biaya perawatan 2. Pemberian bantuan uang duka <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan kematian b. Memberikan bantuan uang duka 3. Fasilitasi pembuatan Kartu Taspen <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima dan memeriksa berkas pengajuan b. Mengirimkan berkas ke kantos Taspen Cirebon c. Menyerahkan Kartu taspen kepada yang bersangkutan 4. Cuti Pegawai <ol style="list-style-type: none"> a. Menrima berkas pengajuan cuti b. Mengajukan surat ijin cuti c. Menyerahkan ijin cuti kepada yang beresangkutan 5. Pemberhentian Penghargaan Pegawai <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberitahuan kepada SKPD mengenai usulan PNS yang memenuhi syarat diberikan penghargaan b. Menerima dan memeriksa berkas pengajuan penghargaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		c. Mengirimkan berkas pengajuan penghargaan kepada Presiden melalui Gubernur d. Menyerahkan penghargaan ke yang bersangkutan
	19. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten
	20. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten
	21. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten.
7. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan palsan skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan sissan skala kabupaten. 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kabupaten.
	2. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kabupaten. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten
	3. Pembinaan Palsan	1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten. 3. Pemeliharaan palsan tingkat O. 4. Penghapusan palsan skala kabupaten
	4. Pembinaan Sissan	1. Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten. 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten. 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kabupaten
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten.
	6. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)
	7. Pengkajian	

U. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. a. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 4. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten.
	5. Keuangan dan Aset Desa	1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
	4. Pelatihan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.
7. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.
8. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
9. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	2. Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten.
	3. Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten.
	4. Fasilitas Prasarana dan Sarana Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.
	5. Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kabupaten. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.
	6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan fasilitasi pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten. Penyelenggaraan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.

V. BIDANG SOSIAL (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten. Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah kabupaten dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS)
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten
4. Pembinaan Bidang Sosial		<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		5. Penyuluhan dan bimbingan sosial 6. Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan 7. Pelayanan kesejahteraan lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti) 8. Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup kabupaten 9. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti) 10. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat 11. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis dan eks nara pidana) 12. Pemberdayaan keluarga miskin meliputi : fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi dalam lingkup kabupaten 13. Pemberdayaan karang taruna 14. Pemberdayaan organisasi sosial/LSM/organisasi profesi di lingkup kabupaten 15. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) 16. Pemberdayaan dunia usaha (partisipasi dalam UKS)
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten 2. Pengumpulan sumbangan sosial di lingkup kabupaten 3. Penanggulangan korban bencana alam lingkup kabupaten 4. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan usia lanjut) lingkup kabupaten 5. Penanggulangan korban NAPZA
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.
7. Pelaksanaan Program/ Kegiatan Bidang sosial		1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten 2. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga 3. Pelayanan kesejahteraan sosial angkatan kerja 4. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/sosial 5. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial lingkup kabupaten 6. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang UKS lingkup kabupaten 7. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten 8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten.
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala kabupaten
16. Pengumpulan Uang atau Barang		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
(Sumbangan Sosial)		
17. Undian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten.

W. BIDANG KEBUDAYAAN (URUSAN WAJIB) DAN PARIWISATA (URUSAN PILIHAN)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten. 5. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan daerah di tingkat kabupaten 6. Memberikan penghargaan kebudayaan di tingkat kabupaten <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan usul/calon penerima penghargaan kebudayaan di tingkat provinsi b. Melaksanakan pendataan informasi kebudayaan c. Melaksanakan kerjasama tingkat kabupaten dan luar negeri d. Memberikan izin kegiatan kebudayaan antar kabupaten e. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual antara lain penelitian,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>pengkajian, penulisan, penanaman dan perluasan informasi di tingkat kabupaten</p> <p>f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa antara lain melalui perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi sejarah di tingkat kabupaten</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nilai-nilai sejarah nasional 8. Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain 9. mengisi pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada 10. Mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan 11. Melaksanakan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala kabupaten 12. Melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala kabupaten 13. Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya 14. Memberi izin membawa benda cagar budaya dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya dalam satu propinsi 15. Menerima permohonan kepemilikan benda cagar budaya dari pemilik 16. Melaksanakan pengawasan pencarian benda cagar budaya 17. Melaksanakan pendaftaran benda cagar budaya 18. Melaksanakan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs 19. Melaksanakan kerjasama budaya daerah kabupaten
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten.
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten.
	4. Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten. 3. Melaksanakan penyebarluasan seni 4. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten. 5. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten. 6. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten. 7. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten. 8. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten. 9. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 11. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten. 12. Melaksanakan penggalian, penelitian dan pengayaan seni di tingkat kabupaten 13. Melaksanakan pemberian penghargaan seni 14. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni
	5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten. 7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten. 9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten.
	6. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kabupaten. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten. 3. Penetapan BCB/situs skala kabupaten. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten. 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten. 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten. 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten. 7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten. 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten. 10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten. 13. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten dalam satu provinsi. 14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten. 15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten. 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten. 17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten. 18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten. 19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten. 20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten. 21. Pemetaan sejarah skala kabupaten. 22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten. 23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di kabupaten.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten.</p> <p>33. Menetapkan pemberhentian dan pensiun tenaga kebudayaan di kabupaten</p> <p>34. Menetapkan pembentukan, penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelolaan kebudayaan di tingkat kabupaten</p> <p>35. Menetapkan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kebudayaan di kabupaten</p> <p>36. Menetapkan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kebudayaan tingkat kabupaten</p> <p>37. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/perindungan dan pemanfaatan museum tingkat kabupaten</p> <p>38. Melaksanakan pemasyarakatan peraturan permuseuman dalam rangka pelestarian</p> <p>39. Menyiapkan data pendukung permintaan zoning</p> <p>40. Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya</p> <p>41. Melaksanakan studi AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar alam</p> <p>42. Melaksanakan operasionalisasi laboratorium konservasi kebudayaan</p> <p>43. Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya</p> <p>44. Memasyarakatkan bahasa Indonesia buku dan sastra Indonesia di kabupaten</p> <p>45. Memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat kabupaten</p> <p>46. Meneliti dan menelaah sastra daerah</p> <p>47. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan</p> <p>48. Melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu</p> <p>49. Meningkatkan kemampuan pemakai bahasa asing</p> <p>50. Melaksanakan penelitian prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi islam dan arkeologi lingkup daerah</p> <p>51. Meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa asing</p> <p>52. Melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di kabupaten yang sama</p> <p>53. Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan budaya di kabupaten</p> <p>54. Melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan di kabupaten</p> <p>55. Mendayagunakan informasi untuk perencanaan program kebudayaan di kabupaten</p> <p>56. Mendayagunakan program-program kebudayaan daerah kabupaten</p> <p>57. Melaksanakan pengawasan dan pengesahan pengelolaan cagar budaya di kabupaten</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		58. Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas, sarana, fasilitas penunjang dan pelayanan di bidang kebudayaan dan pariwisata
3. Kebijakan Bidang Kepariwisata	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> a. RIPP kabupaten. b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kabupaten. h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten. i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten. 2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin terhadap perusahaan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) termasuk rekreasi dan hiburan umum, usaha jasa dan sarana pariwisata, serta usaha seni dan sarana budaya b. Pengawasan terhadap perusahaan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) termasuk rekreasi dan hiburan umum, usaha jasa dan sarana pariwisata, serta usaha seni dan sarana budaya 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten. 6. Penetapan inventarisasi potensi objek dan kawasan wisata 7. Pengaturan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata
4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran/ event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. c. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten. e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten. f. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten. 3. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten. 4. Melaksanakan perintisan objek dan kegiatan wisata

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		5. Melaksanakan sertifikasi dan pemberian izin operasi pramuwisata 6. Pembinaan promosi pariwisata tingkat kabupaten 7. Melaksanakan kerjasama internasional di bidang pariwisata 8. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata 9. Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada objek wisata dan kawasan wisata 10. Melakukan penyetoran hasil retribusi objek wisata di kawasan wisata kepada kas daerah 11. Pelaksanaan pelatihan teknis aparat pengelola/SDM pariwisata 12. Koordinasi pengembangan wisata agro dengan propinsi atau multistakeholder
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan Balai Arkeologi. 5. Menetapkan pemberian/tanda jasa dan kesejahteraan kepada tenaga kebudayaan tingkat kabupaten dan mengusulkan pemberian penghargaan/tanda jasa tingkat nasional

X. BIDANG STATISTIK (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Statistik Umum	1. Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten.
	2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	1. Penyusunan dan pengembangan data indikator makro pembangunan Kabupaten Majalengka 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak pembangunan di Kabupaten Majalengka
	3. Fasilitasi dan pembinaan	1. Pelaksanaan pelaporan data dan informasi pembangunan di Kabupaten Majalengka 2. Pembinaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka
2. Statistik Dasar	Statistik dasar meliputi: Sensus, Survei Antar Sensus	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten: 2. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten:
3. Statistik Sektor	Koordinasi Statistik Antar Sektor	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten.
4. Statistik Khusus	Pengembangan Statistik Khusus Jejaring	Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten.

Y. BIDANG KEARSIPAN (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Kearsipan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. g. Pemberian sosialisasi / Pembinaan Teknis Kearsipan di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional h. Penyelenggaraan Akuisisi Kearsipan di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. i. Peningkatan kinerja pengolahan dan pelestarian arsip di Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. j. Pengadaan dukungan sarana dan prasarana di Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. k. Peningkatan profesionalisme Arsiparis dan Pengelola Arsip sesuai dengan standar kebijakan nasional. l. Pelaksanaan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan standar kebijakan nasional. m. Pelaksanaan pelayanan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai standar kebijakan nasional. n. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai standar kebijakan provinsi / nasional. o. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kearsipan di lingkungan kabupaten, provinsi dan pusat sesuai dengan kebijakan nasional.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. 2. Pembinaan arsip dinamis aktif terhadap perangkat daerah di Kabupaten , Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. 3. Pembinaan arsip dinamis in aktif terhadap perangkat daerah di Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. 4. Pembinaan arsip statis terhadap perangkat daerah di Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. 5. Pembinaan arsiparis dan pengelola arsip di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. 6. Apresiasi kearsipan terhadap pejabat eselon II, III, dan IV serta para Kepala Sekolah SLTA / SLTP dan SD atau yang sederajat sesuai kebijakan nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten. 2. Pelaksanaan penyelamatan arsip vital di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa Kelurahan. 3. Pelaksanaan penyelamatan arsip bernilai sejarah di lingkungan kabupaten sesuai kebijakan nasional. 4. Pelaksanaan penyelamatan arsip dinamis aktif, dinamis in aktif dan statis di lingkungan kabupaten sesuai kebijakan nasional. 5. Melaksanakan restorasi dan vreserti arsip di lingkungan kabupaten sesuai kebijakan nasional. 6. Melaksanakan fumigasi arsip di lingkungan kabupaten sesuai kebijakan nasional. 7. Membuat sistem penggunaan gedung arsip bebas gangguan hama melalui security control di Kantor Arsip Daerah dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai kebijakan provinsi / nasional.
	4. Akreditasi dan Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penilaian penyelenggaraan kearsipan di kabupaten sesuai kebijakan nasional 2. Pengadaan kebutuhan ruang proses dan penyimpanan arsip dinamis aktif / in aktif dan statis aesuai standar kebijakan nasional. 3. Pengadaan kebutuhan peralatan dan perawatan arsip sesuai standar kebijakan nasional. 4. Pengadaan tenaga arsiparis dan pengelola arsip sesuai kebijakan nasional.
	5. Pengawasan/ Supervisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah di lingkungan kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten , kecamatan dan Desa / Kelurahan. 3. Penilaian terhadap arsiparis dan pengelola arsip di kabupaten sesuai standar kebijaka provinsi / nasional.

Z. BIDANG PERPUSTAKAAN (URUSAN WAJIB)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM.(pengelola perputakaan)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	Pelaksanaan sertifikasi keputakawanan melalui perpustakaan nasional.
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

AA. BIDANG KEHUTANAN (URUSAN PILIHAN)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Inventarisasi Hutan		1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten. 2. Penyelenggaraan inventarisasi terestris dan pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kabupaten
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		1. Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru 2. Penyelenggaraan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (antara lain wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan), izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dari bukan kayu pada hutan produksi 3. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung 4. Pemungutan dan penatausahaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan 5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata usaha hasil hutan serta Tata Usaha Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Penyelenggaraan perizinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet di hutan lindung, hutan produksi dan habitat buatan 7. Penyelenggaraan perizinan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan yang tidak termasuk dalam daftar Appendix Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES) 8. Pemberikan izin kegiatan hutan kemasyarakatan di wilayah kabupaten
3. Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekonstruksi hutan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kabupaten 2. Pengesahan rencana pemanfaatan hutan produksi (RKT, RKL, dan RKPH) 3. Penyelenggaraan hutan hak (hutan rakyat) di wilayah kabupaten 4. Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RBPI) pengolahan hasil hutan bagi Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) yang bersumber bahan bakunya berasal dari kabupaten yang bersangkutan 5. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan lindung 6. Rehabilitasi hutan magrove di dalam dan luar kawasan hutan kecuali pada kawasan hutan konservasi 7. Penyelenggaraan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam daftar Appendix Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES) pada areal buru dan kebun buru
4. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten dengan pertimbangan gubernur 2. Pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan
5. Penatagunaan Kawasan Hutan		<p>Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.</p>
6. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		<p>Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.</p>
7. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP 2. Perencanaan pembangunan kehutanan wilayah kabupaten
8. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP. 2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi wilayah pengelolaan hutan masyarakat di wilayah kabupaten 3. Penyelenggaraan pengelolaan persuteraan alam 4. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah dan air
9. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP. 2. Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktifitas

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
(Tahunan) Unit KPHP		3. Penatausahaan hasil hutan 4. Penertiban hasil hutan ilegal 5. Pembinaan penggunaan benih, pupuk dan pestisida untuk tanaman kehutanan 6. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada hutan tanaman 7. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan
10. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi
11. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi
12. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi 2. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana kebakaran pada kawasan hutan 3. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan hasil hutan
13. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten
14. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL
15. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL
16. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL
17. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		
18. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung
19. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung
20. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi 2. Penyelenggaraan pengelolaan perlebahan
21. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
22. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK
23. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK
24. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
Wisata Alam dan Taman Buru		
25. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten
26. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten
27. Pengelolaan Taman Hutan Raya		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten 2. Penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan raya dan hutan kota wilayah kabupaten 3. Pengelolaan taman hutan raya dan hutan kota di wilayah kabupaten
28. Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten.
29. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten.
30. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
31. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
32. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
33. Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu
34. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten
35. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
36. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten.
37. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis skala kabupaten. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kabupaten. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten
38. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota.
39. Pelaksanaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.
40. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
41. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten
42. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan
43. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan
44. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
45. Perbenihan Tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
46. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten
47. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES.
48. Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten
49. Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten.
50. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten
51. Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten
52. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten
53. Pengawasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan

BB. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (URUSAN PILIHAN)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
<p>1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten. 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupatendan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupatendan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupatendan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten. 9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten. 10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten. 11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah kabupaten. 12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten. 13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten. 14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten. 15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/ kota. 16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten. 17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten. 18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten. 19. Pengelolaan air bawah tanah <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah b. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan atau mata air

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusaha dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah d. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah e. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan atau mata air f. Memberian izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), izin penurapan (SIP), dan izin pengambilan mata air (SIPMA) g. Memberikan izin juru bor (SIJB) air bawah tanah h. Memberikan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT) i. Menetapkan dan mengatur system jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah j. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan atau mata air dalam wilayahnya k. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah <p>20. Inventarisasi energi dan sumberdaya mineral</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumber daya mineral non migas pemerintah daerah skala lebih besar 1 : 100.000 b. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi skunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan di bidang pertambangan umum di daerah c. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi energi dan sumber daya mineral non migras di daerah/Bank Data Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah d. Menyampaikan laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumberdaya mineral non migas di daerah kepada pemerintah melalui : Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral
2. Geologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten. 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten. 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten. 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten. 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten. 7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten. 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten. 9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyidik bumi nasional pad0a wilayah kabupaten. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten. 12. Survey dasar geologi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau sama dengan 1 : 50.000

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> 13. Penanggulangan bencana alam geologi <ul style="list-style-type: none"> a. Membuat peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1 : 125.000 b. Pemantauan bencana gerakan tanah 14. Pengelolaan kawasan kars <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan inventarisasi kawasan kars b. Melakukan penyelidikan untuk menentukan klasifikasi kawasan kars c. Membuat skala kawasan kars skala lebih besar atau sama dengan skala 1 : 100.000 15. Pengelolaan perusahaan pertambangan umum dalam wilayah Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> a. Pertambangan Umum (KP) <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin/KP Penyediaan Umum 2. Izin/KP Eksplorasi 3. Izin/KP Eksploitasi 4. Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian 5. Izin/KP Pengangkutan/penjualan 6. Izin/KP Penugasan 7. Perpanjangan Izin/KP Penyelidikan Umum 8. Perpanjangan Izin/KP Eksplorasi 9. Perpanjangan Izin/KP Eksploitasi 10. Perpanjangan Izin/KP pengolahan dan pemurnian 11. Perpanjangan Izin/KP pengangkutan/penjualan 12. Peningkatan KP penyelidikan umum dan eksplorasi 13. Peningkatan KP eksplorasi ke KP Eksploitasi 14. Pembatalan penyelidikan umum 15. Pembatalan eksplorasi 16. Pembatalan/pengakhiran KP Eksplorasi 17. Pembatalan Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian 18. Pembatalan Izin/KP pengangkutan/penjualan b. Pertambangan Umum (KK/PPK2B) <ul style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Prinsip Aplikasi 2. Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan 3. Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum 4. Persetujuan Tahap kegiatan Eksplorasi 5. Persetujuan Tahap kegiatan konstruksi 6. Persetujuan Tahap kegiatan studi kelayakan 7. Persetujuan Tahap kegiatan operasi/produksi 8. Pembatalan /Terminasi 9. Perpanjangan Surat Izin penyelidikan Pendahuluan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> 10. Perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum 11. Perpanjangan Tahap Kegiatan Pendahuluan 12. Perpanjangan Persetujuan Tahap Kegiatan Konstruksi 13. Perpanjangan tahap studi kelayakan 14. Perpanjangan tahap kegiatan operasi/produksi 15. Pembatalan/Terminasi c. Rekomendasi/Persetujuan/Izin non inti <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan izin peninjauan (SKIP) 2. Surat izin bekerja eksplorasi 3. Surat izin produksi/tambah percontohan 4. Surat izin pengiriman contoh (bulk sampling) 5. Penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) 6. Perubahan batas/luas wilayah KP Penyelidikan Umum 7. Perubahan batas/luas wilayah KP Eksplorasi 8. Perubahan batas/luas wilayah KP Eksploitasi 9. Pemindahan KP 10. Suspensi/penundaan kegiatan 11. Persetujuan rencana kerja dan biaya serta persetujuan perubahannya 12. Izin usaha jasa pertambangan 13. Persetujuan perubahan pemegang saham 14. Persetujuan perubahan mitra kerja asing dan nasional 15. Persetujuan pencairan security deposit 16. Persetujuan pencairan jaminan kesungguhan 17. Persetujuan kontrak jual beli hasil tambang bagi perusahaan yang berafiliasi 18. Rekomendasi perubahan akte pendirian perusahaan 19. Rekomendasi perubahan investasi 20. Rekomendasi konsolidasi biaya 21. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) 22. Rekomendasi izin tenaga kerja asing 23. Rekomendasi barang modal 24. Rekomendasi Re-Eksport barang/peralatan 25. Rekomendasi penghapusan barang modal 26. Rekomendasi Impor barang/peralatan dengan fasilitas OB 23 27. Rekomendasi survey clearance survey udara 28. Rekomendasi pengembangan pelabuhan khusus kegiatan tambang 29. Rekomendasi pengoperasian pelabuhan khusus kegiatan tambang 30. Pengujian kelayakan dan pemberian izin operasi kapal keruk/kapal hisap

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> 31. Pemeriksaan kelayakan dan pemberian izin gudang bahan peledak 32. Pengujian kelayakan Tanki dan pemberian izin penimbunan bahan bakar cair 33. Pengujian kelayakan dan pemberian izin alat angkut orang (Derek) 34. Pengujian rekomendasi kelayakan pabrik zat asam dan asitelin 35. Pengujian dan persetujuan modifikasi alat tambang 36. Pengesahan kepala/wakil kepala teknik tambang 37. Izin juru ledak (kartu izin meledakan) 38. Persetujuan ketinggian dan keiringan jenjang galian tambang dan timbunan overbuden, tailing, bahan toksik dan bahan galian d. Tugas evaluasi dan persetujuan <ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana penutupan tambang 2. Rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahap suspensi 3. Laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca tambang 4. Laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan masa suspensi 5. Laporan kinerja pengelolaan lingkungan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Rencana tahunan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 2) Realisasi reklamasi untuk penetapan jaminan reklamasi 3) Laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan 4) Laporan semester pengguna lahan 5) Laporan tahunan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan 6) Laporan reklamasi untuk pelepasan jaminan reklamasi 7) Laporan reklamasi untuk pelepasan jaminan reklamasi 8) Laporan terjadinya kasus lingkungan 9) Laporan penanganan/pengendalian kasus lingkungan 6. Laporan kemajuan reklamasi 7. Jaminan reklamasi 8. Evaluasi laporan K-3 Perusahaan e. Tugas evaluasi dan persetujuan <ul style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan 2. Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> 1) Inspeksi rutin 2) Inspeksi terjadinya kasus lingkungan 3) Pengujian kelayakan prasarana-sarana 4) Pengujian kualitas lingkungan 3. Eksplorasi 4. Konservasi 5. Penggunaan tenaga kerja

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Produksi 7. Barang modal 8. Pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri 9. Investasi, divestasi dan keuangan 10. Penerapan standar pertambangan 11. Jasa pertambangan 12. Inspeksi kasus lingkungan 16. Persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi 17. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi 18. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut 19. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi 20. Rekomendasi lokasi pendirian kilang 21. Izin pendirian depot local 22. Izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) 23. Izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah 24. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas 25. Persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan penunjang kecuai yang bergerak di bidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi
3. Ketenagalistrikan		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kabupatendi bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten. 3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten. 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten. 6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten. 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten. 10. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten. 11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten. 12. Menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan dan mengolah data kelistrikan daerah b. Membuat prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah c. Membuat prakiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>d. Menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah</p> <p>e. Menyampaikan rencana umum ketenagalistrikan daerah kepada Pemerintah dan Gubernur</p> <p>13. Menyelenggarakan perizinan usaha ketenagalistrikan</p> <p>Kegiatan :</p> <p>a. Memproses permohonan izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang fasilitas instalasinya tidak terhubung dengan grid nasional yang wilayah usahanya di dalam wilayah kabupaten/kota 2. Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya di dalam wilayah kabupaten/kota 3. Usaha penunjang tenaga listrik (UPL) yang berdomisili di dalam wilayah kabupaten/kota <p>b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha dari pemegang saham</p> <p>c. Melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin yang meliputi aspek teknis, keselamatan/keamanan, pelayanan dan lingkungan</p> <p>d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan kepada Pemerintah dan Gubernur</p> <p>14. Melakukan penegakan hukum dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di daerah</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan b. Melakukan penyelidikan atas tindak pidana di bidang ketenagalistrikan c. Melakukan pengawasan atas ditaatinya standar/persyaratan/norma teknik dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan d. Menyelenggarakan pembinaan di bidang ketenagalistrikan e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan dan pembinaan kepada Pemerintah dan Gubernur <p>15. Menyelenggarakan kebijakan program pemerintah di bidang pemanfaatan energi</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun program Pemerintah Daerah dalam bidang energi, yaitu program diverifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah Daerah di bidang energi b. Menyusun program Pemerintah Daerah di bidang energi c. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah d. Menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi e. Menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada Pemerintah dan Gubernur
4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten. 3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten. 3. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas. 4. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupatendan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM. 2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten.

CC. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (URUSAN PILIHAN)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Umum		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten. 3. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten. 4. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten. 5. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan. 6. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten. 7. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten. 8. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten. 9. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten. 10. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM perikanan di wilayah kewenangan kabupaten. 11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya perikanan di wilayah perairan kabupaten. 12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
2. Perikanan Budidaya		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih (induk) ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar. 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>dan pakan ikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk(benih) ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan atau pemeliharaan ikan. 15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya 16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. 17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. 18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten. 19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. 22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum kewenangan kabupaten.
3. Pengawasan dan Pengendalian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. 7. Pengawasan, pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya ikan di perairan umum (sungai, situ, rawa dan sebagainya) 8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah perairan umum kewenangan Kabupaten (sungai, situ, rawa)
4. Pengolahan dan Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan(lingkungan) tempat ikan hidup. 5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten. 7. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan lahan dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
5. Penyuluhan dan Pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten. 2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten. 4. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta pelatihan fungsional, teknis, keahlian manajemen dan kepemimpinan di bidang perikanan di Kabupaten. 5. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis perikanan di Kabupaten.

DD. BIDANG PERINDUSTRIAN (URUSAN PILIHAN)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten 4. Pemberian izin usaha industri, tanda daftar industri
2. Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten. 2. Pengelolaan dan pengembangan kawasan Berikat 3. Penyelenggaraan pembinaan/pengembangan usaha
3. Fasilitas Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten. 2. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin 3. Memfasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan
4. Perlindungan Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten. 2. Pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten. 2. Penyusunan RPJM SKPD kabupaten di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri.
6. Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi produk industri kabupaten. 2. Penyediaan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual (HKI) dan sumber daya manusia
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten.
12. Kerjasama Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten.
13. Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten.
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi. 2. Penyusunan potensi/profil sektor perindustrian dan perdagangan
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten

EE. BIDANG PERDAGANGAN (URUSAN PILIHAN)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
<p>1. Perdagangan Dalam Negeri</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) b. Pemberian dan pengawasan Izin Sewa Beli c. Pemberian dan pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan Minimal Beralkohol (SIUP-MB) untuk pengecer/penjual langsung untuk diminum d. Rekomendasi Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2.000 M² atau lebih e. Pemberian dan pengawasan Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri f. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal g. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Gudang dengan luas di bawah 2.500 M² h. Pemberian dan pengawasan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten. 5. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi Produk Agro Bisnis, Kerajinan dan barang dagang lainnya b. Penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga) c. Pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan dagang skala Kabupaten 6. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan fasilitas kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok b. Pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan 7. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten. 8. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten. 9. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 10. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten. 11. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kabupaten. 12. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>BPSK.</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM. 14. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. 15. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. 16. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. 17. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten. 18. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten. 19. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten. 20. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten. 21. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten. 22. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten. 23. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten. 24. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten.
2. Metrologi Legal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten. 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. 7. Pembinaan operasional reparatir UTTP. 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.
3. Perdagangan Negeri Luar		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten. 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. 12. Pemantauan dan pengendalian kegiatan impor 13. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 14. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 15. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional. 16. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten. 17. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri. 18. Mendorong usaha peningkatan ekspor daerah
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. 4. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard.
5. Pengembangan Ekspor Nasional		1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten.
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

SUHARDJA

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR